

**PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP,
PENERAPAN SPIP,PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

KUSRIANANDA RAHMADHANI DWI PUTRI

NIM: 31401700095

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

**PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP,
PENERAPAN SPIP,PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

KUSRIANANDA RAHMADHANI DWI PUTRI

NIM: 31401700095

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, PENERAPAN SPIP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Disusun Oleh:

Kusriananda Rahmadhani Dwi Putri

NIM : 31401700095

Telah Disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya

Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA

جامعة ائمة الصوفى الاسلامية

Semarang, 15 Desember 2021

Pembimbing,



Digitally signed
by Lisa Kartikasari
Date: 2022.01.07
09:46:36 +07'00'

Lisa Kartikasari, SE., M.Si., AK., CA

NIK. 211402010

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, PENERAPAN SPIP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Disusun Oleh

Kusriananda Rahmadhani Dwi Putri

NIM : 31401700095

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji

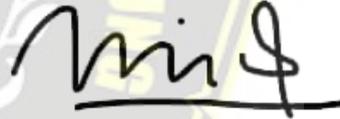
Pembimbing



Digitally signed
by Lisa Kartikasari
Date: 2022.01.07
09:46:36 +0700'

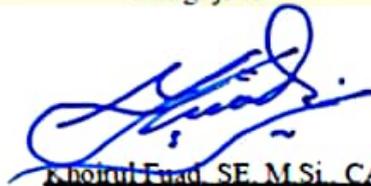
Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

Penguji I



Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si
NIK. 211415029

Penguji II



Khoirul Firdaus, SE, M.Si, CA
NIK. 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelara Sarjana Akuntansi Tanggal 27 Desember 2021

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang menyatakan serta bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusriananda Rahmadhani Dwi Putri

NIM : 31401700095

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, PENERAPAN SPIP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN AUDIT”

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Desember 2021
Yang memberi pernyataan



Kusriananda Rahmadhani Dwi Putri
NIM: 31401700095

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSRIANANDA RAHMADHANI DWI PUTRI

NIM : 31401700095

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi*~~ dengan judul:

“PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, PENERAPAN SPIP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN AUDIT”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2021

Yang menyatakan



Kusriananda Rahmadhani Dwi Putri
31401700095

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSRIANANDA RAHMADHANI DWI PUTRI

NIM : 31401700095

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi* dengan judul:

“PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, PENERAPAN SPIP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN AUDIT”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Semarang, 27 Desember 2021
Yang menyatakan



Kusriananda Rahmadhani Dwi Putri
31401700095

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. *Banyak orang memimpikan kesuksesan, tapi hanya sedikit orang yang mau mewujudkannya. Maka dari itu pastikan kita adalah salah satu diantaranya.*
2. *Keberhasilan meraih mimpi harus didasari pada sikap taqwa dan yakin kepada Allah SWT.*
3. *Lakukan dengan ikhlas, dan terima hasilnya dengan tawakal*

Persembahan:

Karya Tulis Berupa Skripsi ini saya persembahkan kepada:

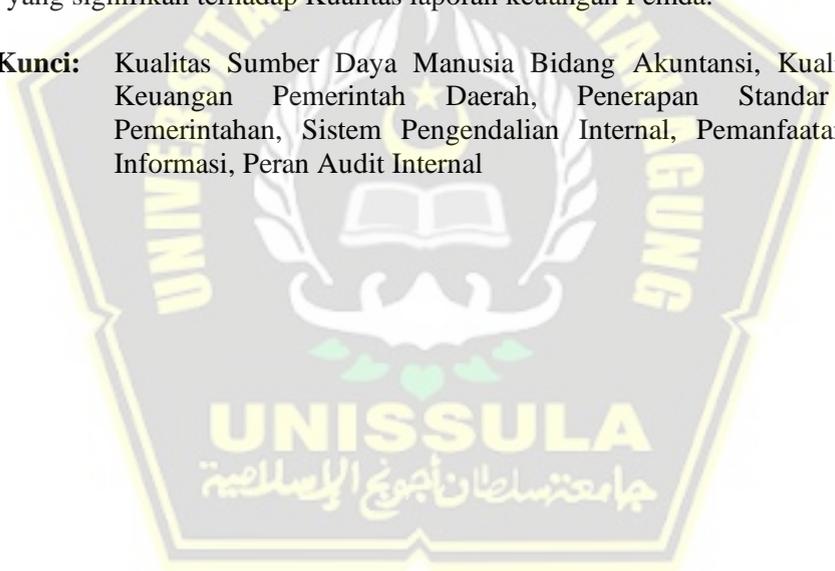
1. Orang Tua
2. Suami
3. Kakak
4. Adik
5. Teman-Teman Seperjuangan



ABSTRAK

Realisasi dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintahan(SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Pati sejumlah 37 OPD yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 8 Dinas, 3 Badan, 1 Kantor, 2 RSUD, dan 20 kecamatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 63 responden. Untuk alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda. Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda.

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Audit Internal



ABSTRACT

The realization of this research is to find out how the influence of the quality of human resources in the accounting sector on the financial quality of local governments. The application of government accounting standards to the quality of local government financial reports. Government internal control system (SPIP) on the quality of local government financial reports. Utilization of information technology on the quality of local government financial reports and the role of internal audit on the quality of local government financial reports. The population used in this study were all Regional Apparatus Organizations (OPD) in Pati Regency with a total of 37 OPDs consisting of 2 secretariats, 1 inspectorate, 8 offices, 3 agencies, 1 office, 2 hospitals, and 20 sub-districts. The sample is part of the population under study. Sampling was done by purposive sampling in order to obtain a total sample of 63 replies. The analytical tool used is multiple linear regression analysis with the results of the study showing that HR competence has a significant influence on the quality of local government financial reports. The application of Government Accounting Standards has a significant positive effect on the quality of local government financial reports. The Internal Control System has a significant positive effect on the quality of local government financial reports. Utilization of Information Technology has a significant positive effect on the quality of local government financial reports

Keywords: *Quality of Human Resources, Quality of Local Government Financial Reports, Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, The Role of Internal Audit*



INTISARI

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah sesuai prinsip yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan tingkat pemerintahan pusat pada Peraturan MK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pertanggungjawaban dan penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah yang baik terdapat pula pada UU No. 17 Th 2003 mengenai Keuangan Negara dan UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah (Bayu, 2015). Laporan keuangan adalah media untuk sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Dasmawan, et.al, 2018) Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Apabila informasi yang terdapat pada Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki semua karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, hal ini menunjukkan pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Bayu, 2015). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Pati sejumlah 37 OPD yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1

Inspektorat, 8 Dinas, 3 Badan, 1 Kantor, 2 RSUD, dan 20 kecamatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 63 responden. Untuk alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda. Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemda.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian untuk Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah ” dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik yang diucapkan secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Lisa Kartikasari, SE., M.Si., AK., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dengan sabar, memberikan arahan, motivasi, kritik dan saran yang sangat berguna sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu tercinta (Kusnadi dan Sri Ekowati) yang telah memberikando'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang baik dalam segi moral maupunmateriil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Kakakku Aditya Bagus Setyawan, dan suami tercinta Rofiq Andriyan.
6. Untuk sahabat tersayang, Jihan Athaya, Nima Aulia, Laurina Klarissa, Diana Permatasari, Mey Wulandari, Rani Khusnul Fitria yang telah menyemangati dan memotivasi penulis. Terimakasih untuk kebersamaan kita yang luar biasa.
7. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 yang membantu dalam penyusunan Skripsi dari awal hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Semarang, 27 Desember 2021
Peneliti



Kusriana Dwi Putri
NIM. 31401700095



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
INTISARI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 <i>Grand Theory</i>	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.2 Variabel-Variabel Penelitian	14
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	15
2.2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	16
2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).....	17
2.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).....	18
2.2.6 Peran Internal Audit.....	20
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	21

2.3.1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.3.2	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.3.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.3.4	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.3.5	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis	26
BAB III		28
METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Populasi dan Sampel.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5	Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	30
3.5.1	Variabel Dependen (terikat)	31
3.5.2	Variabel Independen (bebas)	31
3.5.3	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	32
3.5.4	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	32
3.5.5	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	34
3.5.6	Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	34
3.5.7	Peran Audit Internal	35
3.6	Teknik Analisis	37
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	37
3.6.2	Uji Kualitas Data	37
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	37
3.6.3.1	Uji Normalitas	37
3.6.3.2	Uji Heteroskedastisitas	38
3.6.3.3	Uji Multikolinearitas.....	38
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	38
3.6.4.1	Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.6.5	Uji Keباikan Model	39
3.6.5.1	Uji F.....	39
3.6.5.2	Koefisien Determinasi	39
3.6.5.3	Uji t.....	40

BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Deskripsi Sampel	41
4.2 Uji Validitas	44
4.2.1 Pengaruh Kompetensi SDM.....	44
4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	45
4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).....	46
4.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi	46
4.2.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan.....	47
4.3 Uji Reliabilitas.....	47
4.4 Analisis Deskriptif.....	48
4.4.1 Deskripsi Variabel Kompetensi SDM	50
4.4.2 Deskripsi Variabel Penerapan SAP	51
4.4.3 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).....	52
4.4.4 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	53
4.4.5 Deskripsi Variabel Peran Audit Internal.....	54
4.4.6 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	55
4.5 Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1 Uji Normalitas	56
4.5.2 Uji Multikolinieritas	57
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	59
4.7 Uji Goodness of Fit	61
4.7.1 Uji Parsial (Uji T).....	61
4.7.2 Uji F	63
4.7.3 Uji Determinasi R ²	64
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian	65
4.8.1 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	65
4.8.2 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap kualitas laporan keuangan	65
4.8.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap kualitas laporan keuangan	66
4.8.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	67
4.8.5 Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap kualitas laporan keuangan	68
BAB V	69
PENUTUP	69

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
5.2.1 Saran untuk Kepala dan staf sub bagian akuntansi / penatausahaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :	70
5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya	71
5.3 Keterbatasan Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Variabel Independen Variabel Dependen27



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Pati Tahun 2015-2019	4
Tabel 3. 1 Kriteria Sampel OPD	29
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran.....	36
Tabel 4. 1 Rincian Pengembalian dan Pengiriman Kuisisioner.....	41
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Pengaruh Kompetensi SDM.....	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Pengaruh SAP	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).....	46
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi informasi	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan.....	47
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Tentang Kompetensi SDM	50
Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Tentang SAP	51
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).....	52
Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi ..	53
Tabel 4. 13 Tanggapan Responden Tentang Peran Audit Internal	54
Tabel 4. 14 Tanggapan Responden Tentang Kualitas Laporan Keuangan	55
Tabel 4. 15 Hasil Uji One-sample Kolmogorov-Smirnov Test	56
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4. 17 Konklusi Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4. 18 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
Tabel 4. 19 Hasil Uji Hipotesis Parsial	61
Tabel 4. 20 Konklusi Uji F.....	63
Tabel 4. 21 Konklusi Uji Koefisien Determinasi.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, serta prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan di Tingkat Pusat, dapat membantu memastikan keterusterangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan rekening negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Teritorial yang sama-sama memuat ketentuan akuntabilitas dan pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah yang baik (Bayu, 2015). Laporan finansial merupakan salah satu cara lembaga pemerintah untuk mengelabui masyarakat tentang kinerja keuangannya. Pemerintah bertugas menyampaikan laporan finansial yang memuat data finansial yang akurat (Dasmaran, dkk, 2018). Laporan finansial yang berkualitas harus memiliki kualitas-kualitas berikut, menurut Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): harus relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan murah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Dalam hal struktur Laporan Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria subjektif laporan anggaran pemerintah, terlihat bahwa pemerintah daerah mampu mewujudkan tanggung jawab dalam penyelenggaraan moneter daerah (Bayu, 2015). Sangat penting bagi pemerintah lingkungan untuk menyampaikan laporan keuangan berkualitas tinggi, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK pada rekening keuangan mereka. Masih banyak kasus laporan terkait uang negara yang tidak mengungkap, menemukan banyak sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik (Sholohah & Sulistyawati, 2018). Subyektif termasuk penjelasan terkait uang adalah perkiraan pengaturan yang harus dicapai dalam data pembukuan dalam mengatur untuk memenuhi target. Empat kriteria di bawahnya adalah standarisasi kebutuhan laporan pemerintah untuk mencapai ukuran kualitas yang ditetapkan dalam PP 71 tahun 2010, yang merupakan premis sah untuk SAP: penting, andal, tersedia, dan terbuka (Hakim, 2017).

Temuan analisis BPK terhadap 700 Laporan Pemeriksaan (LHP), yang meliputi 652 LHP keuangan (93%) dan 12 LHP kinerja (2%), serta 36 LHP dengan tujuan khusus (DTT) (5 persen). Secara umum, pemeriksaan BPK menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 512 (79 persen) dari 652 laporan keuangan yang diaudit selama Semester I tahun 2018. Kesimpulan belum sepenuhnya efektif dalam 5 (42 persen) dari 12 item yang dipelajari, menurut temuan evaluasi kinerja umum. Temuan penyelidikan DTT menunjukkan bahwa di 24 (67 persen) dari 36 objek, tindakan tidak direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan hukum. Akuntabilitas publik diklasifikasikan teori keagenan adalah tanggung

jawab wali (agent) dalam menjaga amanat (prinsipal) yang memiliki hak dan kewajiban menanggapi. wewenang untuk mengemban tugas tersebut (Latjandu dkk, 2016). Praktik pelaporan finansial di sektor publik merupakan gagasan yang didasarkan pada teori keagenan sehubungan dengan kesulitan keagenan. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menawarkan informasi yang relevan kepada konsumen data finansial pemerintah, yang menjadi prinsip evaluatif atas konklusi manajerial yang akan ditetapkan.

Terdapat 140 LKPD belum memperoleh opini WTP dikarenakan adanya ketidaksesuaian penyajian akun – akun dalam LK yang telah diatur oleh SAP. Penyajian LK yang tidak sesuai dengan SAP seperti tidak sesuai penyajian belanja modal, beban operasi-LO, belanja operasi, asset lancar, asset tetap, asset lainnya, investasi jangka panjang, kewajiban jangka pendek. Terdapat tiga akun ternilai permasalahannya yang mempengaruhi kewajaran dalam penyajian LKPD di IHPS II tahun 2018 ialah : (1) asset lancar terdapat di pemda, yaitu kas dipergunakan dalam kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, belum terdapatnya penyajian piutang sebanyak nilai bersih yang bias direalisasi, dan pada nilai persediaan belum disajikan berpedoman *stock opname*.

(2) asset tetap di pemda, belum dilakukannya pencatatan atau terjadinya pencatatan yang tidak akurat serta tidak bisa diidentifikasi keberadaannya seperti halnya asset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung, mesin dan peralatan, irigrasi dan jaringan. (3) belanja operasional di pemda, diantaranya identifikasi belanja fiktif, belanja barang tidak sesuai pada kebutuhan, belanja hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan dantidakbisa ditelusuri. Laporan hasil pemeriksaan Badan

Pengawas Keuangan (BPK) memberi opini WTP pada 512 LKPD termasuk laporan keuangan Kabupaten Pati. berikut hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pati Tahun Anggaran 2012-2016.

Tabel 1. 1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Pati Tahun 2015-2019

No	Tahun	Opini BPK
1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: www.semarang.bpk.go.id

Kabupaten Pati memperoleh nilai opini wajar tak terkecuali oleh BPK berturut-turut dalam 5 tahun. Kemajuan yang direalisasikan Kabupaten Pati agar memperoleh opini WTP dikarenakan dilakukannya perbaikan terhadap kelemahan yang ada pada tahun 2019 diantaranya melakukan pengoreksian yang dibutuhkan terhadap penyajian kas dalam laporan keuangan, evaluative atas segala nilai piutang atas pajak desa dan perkotaan (PBB-P2) dan ditelusurinyaper Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak, diubahnya system pengelolaan PBB- P2 yang bisa terkoneksi oleh bank hingga direalisasikanatas penyisihan piutang pokokretribusi, dan nilai investasi permanen disajikan pada BUMD berpedoman dari nilaiekuitas bersih pada laporan finansialisatahun 2019 dan evaluasi penilaian terhadap asset yang ada pada BUMD. Perlu adanya pendampingan dan arahan kepada staf sub bagian akuntansi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak terjadi penyalahgunaan data informasi dalam proses penyusunannya. Materi Pelatihan mengenai fungsi pengelolaan keuangan perlu dikaji ulang agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Rasa Kepercayaan diri staf sub bagian akuntansi perlu lebih

ditingkatkan karena masih banyak staf yang takut untuk meninggalkan lembaga tempat mereka bekerja sekarang karena khawatir tidak bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pencatatan transaksi yang ada di OPD yang dilakukan oleh staf perlu mendapat pendampingan dari kepala bagian, agar transaksi yang dicatat dapat sesuai dengan realitas ekonomi yang ada (meminimalisir manipulasi data transaksi).

Berpedoman konklusi analitis BPK, Kabupaten Pati Tahun 2015 – 2019 Laporan Finansialisasi mendapat Opini Wajar tak terkecuali (WTP). Kajian BPK atas Laporan Finansialisasi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017 di sisi lain mengungkap (SPIP) yang ditemukan BPK terjadi karena pencatatan uang jaminan dan pengelolaan remunerasi yang belum memadai. www.bpk.go.id diakses 2017. Meski BPK masih menemukan kekurangan dalam data penyusunan laporan finansialisasi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, setidaknya penyajiannya sudah diperbaiki. Laporan Finansialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati semakin membaik. Pelaporan Finansialisasi Pemerintah Daerah Berkualitas Tinggi. Laporan finansialisasi dirancang untuk mencapai tujuan pelaporan finansialisasi, tetapi tidak selalu sesuai dengan tuntutan audiens yang dituju. Entitas dapat menyusun laporan finansialisasi untuk tujuan tertentu selain laporan finansialisasi untuk tujuan umum. Diklasifikasikan Pebriani (2019), instansi pemerintah harus dapat memberikan laporan finansialisasi. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang merinci situasi dan aktivitas keuangan dari entitas atau instansi yang menerbitkan laporan tersebut dalam indikator keuangan dan non-keuangan, disiapkan di suatu instansi pemerintah..

Berbagai temuan riset terdahulu mengenai pengaruh unsur-unsur yang dapat

mempengaruhi kualitas laporan finansialisasi untuk menghasilkan laporan finansialisasi yang memiliki nilai informasi telah banyak ditemukan. Temuan riset ini masih belum meyakinkan. Beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas laporan finansialisasi berpedoman riset sebelumnya adalah: kualitas sumber daya manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal terhadap kualitas laporan (Pujanira & Taman, 2017; Septarini & Papilaya, 2016; Sholohah & Sulistyawati, 2018; Sukiati et al., 2016; Wardani & Andriyani, 2017). Karena sumber daya manusia yang tidak mencukupi, kualitas LKPD masih rendah (Subrata, 2017). Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen yang kritis, dan harus senantiasa dijaga agar pengelolaan yang benar direalisasikan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi tujuan organisasi. Kurangnya kualitas sumber daya manusia ini mungkin disebabkan karena banyak pekerja finansialisasi OPD yang bukan merupakan lulusan sarjana akuntansi sehingga dapat berdampak pada kualitas pelaporan finansialisasi pemerintah daerah.

Hal ini didukung oleh riset yang direalisasikan oleh (Trisnawati & Wiratmaja, 2018), yang menemukan bahwa untuk menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah harus menaikkan kualitas sumber daya manusia benar-benar dapat menghasilkan laporan keuangan. Pangestu, et al., (2019) menyatakan hal yang sama, yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas aset manusia telah membantu menaikkan kualitas laporan penganggaran. Sedangkan konklusi yang berbeda didapati pada riset (Agustus & Razak, 2017).

SAP mungkin menjadi standar yang memastikan bahwa laporan anggaran dibuat untuk memenuhi ukuran data terkait uang yang signifikan bagi klien. Kehadiran data berharga menunjukkan bahwa penjelasan moneter persyaratan informasi. Dengan demikian adanya penerapan SAP berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh konklusi riset (Sholohah & Sulistyawati, 2018) yang menemukan bahwa penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah hal ini sesuai dengan sudut pandang riset (Pujanira & Taman, 2017). Namun konklusi temuan yang dicapai oleh Baturante, et al. (2018), bagaimanapun, adalah bahwa implementasi SAP dan kualitas LKPD memiliki pengaruh yang dapat diabaikan. Kerangka Pengendalian Orang Dalam Pemerintah (SPIP) berdampak pada kualitas laporan anggaran pemerintah (SPI) di sekitarnya. SPI berhasil dengan baik sehingga penanganan pembukuan dapat dibuat lebih efektif dan cakap, terutama dalam membuat laporan anggaran yang berkualitas. Alhasil, Kerangka Pengendalian Dalam Negeri (SPIP) Pemerintah dapat memajukan objektivitas dan objektivitas data serta kemudahan tinjauan anggaran. Kelangsungan Government's Inside Control Framework (SPIP) juga merupakan angka dalam kualitas luar biasa dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menjadi faktor kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sangat baik. Hal ini dikuatkan oleh riset (Wardani & Andriyani, 2017), yang menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menaikkan nilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Konklusi riset (Sukiati et al., 2016) memperlihatkan bahwa

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdampak pada kualitas data keuangan. Pelaksanaan seksi SPI dibantu oleh penetapan regulasi yang tegas baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) maupun standar akuntansi pelaporan keuangan.

Dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi, kualitas laporan pemerintah akan meningkat (Hasyim & Nadir, 2017). Menurut temuan riset ini (Haza, 2019), pemerintah yang menerapkan Inovasi komputer dan komunikasi dalam administrasi anggaran pemerintah lingkungan akan memajukan laporan terkait uang dalam hal peluang dan kualitas persiapan serta penyusunan.

Menurut (Mene et al., 2018), penggunaan teknologi telah memberikan apa yang diharapkan, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Riandani (2017), di sisi lain, menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak buruk pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena masih terdapat beberapa peralatan dan *software* yang mendukung rusak dan usang tidak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya sehingga menimbulkan beberapa hambatan bagi aparatur penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fungsi audit internal merupakan aspek selanjutnya yang menentukan kualitas pelaporan keuangan. Audit internal berkontribusi pada nilai tambah organisasi atau perusahaan. Sejalan dengan SAP yang telah ditetapkan di masing-masing OPD, inspektorat keuangan sebagai internal audit berperan dalam mencapai kualitas laporan dan memuaskan tuntutan pengguna. Dengan adanya auditor internal dapat membantu mendeteksi danmempertanyakan kualitas laporan keuangan yang telah

mereka buat sehingga terjamin kualitas laporan keuangan yang dibuat (Erawati & Tarigan,2019). Hal ini didukung konklusi riset (Nugroho & Setyowati, 2019) dimana peran serta internal auditor dalam membantu pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya dengan menawarkan analisis, evaluasi, rekomendasi, dan komentar atas tindakan yang diselidikinya.

Konklusi riset (Erawati & Tarigan, 2019) dan Suyono (2016), di sisi lain mengungkapkan bahwa fungsi auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena audit internal belum maksimal sehingga mengakibatkan laporan keuangan berkualitas rendah. Dari berbagai riset diatas yang memunculkan beragam konklusi riset mendorong peneliti untuk mereplikasi riset sejenis mengenai kualitas sumber daya manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Replikasi riset ini menggunakan jurnal acuan dari riset yang dilakukan oleh (Yaqin & Jatmiko, 2019). Perbedaan riset ini terletak pada penggunaan periode riset dan objek pada OPD di Kabupaten Pati serta menambahkan variabel pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal yang pada riset (Haza, 2019; Nugroho & Setyowati, 2019) serta (Erawati & Tarigan, 2019) dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal menaikkan nilai kualitas laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman *fenomena gap* diatas ditemukan nilai permasalahan, adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu masalah peneliti inidapatdirumuskan sebagai berikut: “bagaimana mengatasi pelaporan keuangan daerah yang masih terdapat kelemahan dalam penelitian mengenai peran sumber daya manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Studi kasus ini mencoba menganalisa tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pemanfaatan Teknologi Informasi dan peran audit internal pada nilai kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansiterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadapKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

(SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Bagaimana pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berpedoman beragam nilai perumusan masalah yang terjabarkan, terkonklusi riset ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk merealisasikan analisa Pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk merealisasikan analisa pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk merealisasikan analisa pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk merealisasikan analisa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran audit internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berpedoman riset yang direalisasikan, periset mengharapkan konklusi analisa riset ini mampu memberikan beragam manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- 1.) Sebagai pengetahuan dan referensi hipotetis dalam menciptakan ilmu akuntansi moneter divisi terbuka.
- 2.) Hasil analisis penelitian dapat menambah kajian keilmuan mengenai penelitian di bidang akuntansi keuangan daerah sektor publik

2. Manfaat Praktis

1.) Bagi Dinas yang Bersangkutan

Kesimpulan dari pertanyaan tersebut mampu menjadi acuan referensial serta dapat bermanfaat dalam memberikan data sebagai bahan pertimbangan kualitas laporan terkait uang sehingga pemerintah lingkungan dapat mengambil keputusan dalam merencanakan uang terkemuka. pernyataan terkait.

2.) Bagi Akademis

Konklusi riset dapat membantu memperkuat bukti empiris dengan fungsi untuk menjadi acuan bagi riset lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai hubungan yang ada antara agen dan prinsip. Teori ini meyakini bahwa kepentingan setiap orang bertentangan dengan kepentingannya yang mampu memberikan nilai efek berupa pertentangan antara pihak pemilik entitas dengan manajerial selaku pengoperasi perusahaan. Prinsip mempekerjakan tenaga ahli guna mengelola beragam sumber daya milik entitas dan untuk memenuhi komitmen agen untuk menghasilkan ketidakseimbangan, sementara tenaga ahli yang bersangkutan bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Baturante dan rekan, 2018). Akuntabilitas publik diklasifikasikan teori keagenan adalah tanggung jawab wali (agent) dalam menjaga amanat (prinsipal) yang memiliki hak dan kewajiban menanggapi. wewenang untuk mengemban tugas tersebut (Latjandu dkk, 2016). Praktik pelaporan finansial di sektor publik merupakan gagasan yang didasarkan pada teori keagenan sehubungan dengan kesulitan keagenan. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menawarkan informasi yang relevan kepada konsumen data finansial pemerintah, yang menjadi prinsip evaluatif atas konklusi manajerial yang akan ditetapkan.

Relasional pemerintah dan pembeli data finansialisasi pemerintah dapat dianggap sebagai hubungan kantor di bawah kekuasaan mayoritas pemerintahan populer. Klien data keuangan pemerintah bertindak sebagai prinsipal, dan pemerintah bertindak sebagai operator yang diizinkan untuk melaksanakan perintah tertentu yang diberikan oleh mereka, baik secara khusus maupun tidak melalui agen mereka. Dari sisi agensi, pemerintah sebagai yang utama harus bertindak untuk kepentingan terbaik pengguna informasi finansialisasi pemerintah.

2.2 Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan Finansialisasi Pemerintah Daerah Berkualitas Tinggi. Laporan finansialisasi dirancang untuk mencapai tujuan pelaporan finansialisasi, tetapi tidak selalu sesuai dengan tuntutan audiens yang dituju. Entitas dapat menyusun laporan finansialisasi untuk tujuan tertentu selain laporan finansialisasi untuk tujuan umum. Diklasifikasikan Pebriani (2019), instansi pemerintah harus dapat memberikan laporan finansialisasi. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang merinci situasi dan aktivitas keuangan dari entitas atau instansi yang menerbitkan laporan tersebut dalam indikator keuangan dan non-keuangan, disiapkan di suatu instansi pemerintah..

Jika data yang ditampilkan dalam artikulasi anggaran bersifat terbuka, bebas dari konsepsi yang menyesatkan, dan menyajikan kebenaran secara jujur yang dapat membantu pengambilan keputusan klien sehingga penjelasan anggaran dapat dibandingkan dengan periode yang lalu, maka artikulasi moneter tersebut dianggap

berkualitas tinggi. (Hakim, 2017).

Subyektif termasuk penjelasan terkait uang adalah perkiraan pengaturan yang harus dicapai dalam data pembukuan dalam mengatur untuk memenuhi target. Empat kriteria di bawahnya adalah standarisasi kebutuhan laporan pemerintah untuk mencapai ukuran kualitas yang ditetapkan dalam PP 71 tahun 2010, yang merupakan premis sah untuk SAP: penting, andal, tersedia, dan terbuka (Hakim, 2017). Dengan demikian dalam riset ini pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator diklasifikasikan riset (Hakim, 2017):

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Diandalkan
4. Dapat Dipahami

2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM mengacu pada kapasitas seseorang atau organisasi untuk menjalankan aktivitas atau wewenangnya guna mencapai tujuan dengan sukses dan efisien. Karena orang menggunakan SPIP dan SAP, Kemampuan aset manusia adalah perspektif vital terpenting dalam membuat laporan anggaran berkualitas tinggi. Kompetensi Aset Manusia, tergolong Pangestu et al. (2019), kapasitas individu atau orang dalam suatu organisasi atau kerangka kerja untuk melaksanakan tugas dengan layak dan efektif dan wewenangnya untuk mencapai tujuan. Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengeksekusi pada level tinggi untuk menciptakan output dan outcome (Sholohah & Sulistyawati, 2018).

Individu yang memiliki kompetensi akan menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas dengan mudah, cepat, dan dengan keahlian dalam mata pelajaran yang relevan dengan pekerjaan untuk mengurangi kesalahan. Ketiga kecenderungan tersebut serupa dengan definisi pada PP No. 101 Tahun 2000 yang menyatakan kompetensi sebagai tingkat kapabilitas yang dimiliki didukung dengan adanya ketrampilan berpikir kuat dalam menjalankan keluar dari tugas mereka." Selanjutnya, personel yang kompeten dapat dievaluasi berpedoman seberapa berhasil mereka melakukan tugasnya, memastikan bahwa mereka siap untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Parameter indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan 3 indikator menurut riset (Ningrum, 2018) yaitu:

1. Pendidikan,
2. Tanggung Jawab
3. Pelatihan
4. Pengalaman

2.2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sejalan dengan Pebriani (2019), Tolok Ukur Pembukuan Pemerintah (SAP) adalah standar pencatatan pada perencanaan dan penyajian Laporan Anggaran Pemerintah, yang mencakup Laporan Moneter Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) LKPD, pada pengaturan yang lugas. dan tanggung jawab pada penyelenggaraan pembukuan pemerintah, serta meningkatkan kualitas akuntansi pemerintahan. Salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas pengendalian finansial negara dan pelaporan pemerintah

adalah penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Guna menyempurnakan prosedur akuntansi finansial di perusahaan pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah harus dibuat Parameter Pembukuan Pemerintah digunakan di lingkungan pemerintahan, di lingkungan pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, pemanfaatan Pedoman Pembukuan Pemerintah dinilai dapat meningkatkan kualitas perincian moneter (Nordiawan et al, 2009). Variabel pemahaman penerapan Pedoman Pembukuan Pemerintah disurvei dengan pointer, setuju Indikator kalkulatif pada variabel ini menurut PP 71 (2010) dalam Sari & Fadli (2017), yaitu:

1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Akuntansi Persediaan
6. Akuntansi Investasi
7. Akuntansi Aset Tetap
8. Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
9. Akuntansi Kewajiban
10. Koreksi Kesalahan
11. Laporan Keuangan Konsolidasi

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Pemerintah menyelenggarakan SPIP dalam rangka pengelolaan anggaran, sejalan dengan PP no. 63 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dapat berupa pengaturan kegiatan dan pelaksanaan yang direalisasikan berkelanjutan oleh penguasa beserta perwakilan guna menjamin tujuan instansi yang ditetapkan melalui pelatihan yang layak dan cakap, pengumuman yang berkaitan dengan uang, keamanan sumber daya negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya, agar dapat dipercaya pada level datanya, Sistem Pengendalian Intern (SPIP) harus terintegrasi secara efektif. Agar sistem operasional tidak bocor, unsur peluang informasi dan otorisasi laporan pertukaran harus diperhatikan. pembagian tugas yang dilimpahkan kepada pihak dengan nilai kompetensi kuat dilakukan untuk menjamin sistem berjalan dengan lancar (Baturante et al., 2018).

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) diukur dengan 5 indikator menurut Pitaloka, et.al (2020) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian resiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan

2.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Komputer, sebagai bagian dari teknologi informasi, adalah instrumen yang dapat meningkatkan keterampilan manusia sekaligus melakukan hal-hal yang mungkin tidak dapat dilakukan orang. Nilai informasi yang dihasilkan tentu akan meningkat ketika data diubah menjadi informasi dengan bantuan komputer. Dalam hal kerangka data pembukuan, kerangka kerja komputer akan diperpanjang. Tidak

ada latihan umum yang disertakan atau dikecualikan saat komputer dan komponen inovasi dikoordinasikan ke dalam kerangka data pembukuan (2018). Pemanfaatan inovasi data melalui pemanfaatan kerangka data berbasis komputer dalam perdagangan data dan otorisasi laporan harus diperiksa. pembagian tugas dan penugasan yang ditujukan kepada pejabat yang berkompeten yang bermanfaat untuk menyelesaikan pekerjaan serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pekerjaannya (Riyadi, 2020). Kerangka data anggaran teritorial dapat membantu dalam mencatat dan mengumumkan anggaran dan dana, serta mengetahui, mengukur, dan mengumumkan pertukaran dari rentang yang digunakan sebagai data untuk pengambilan pilihan dan poin lain yang dianggap penting dalam laporan terkait uang teritorial. Di pemerintahan, kerangka data memainkan peran penting dalam merinci anggaran berkualitas tinggi yang merinci dan menjamin tanggung jawab. Suatu kerangka data dapat dikatakan berhasil jika dapat menghasilkan data yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan data secara cepat, tepat, dan andal (Sari & Fadli, 2017).

Pemanfaatan teknologi terindikasi menggunakan parameter pada riset oleh Wardani et al (2018) yaitu:

1. Proses kerja secara elektronik,
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan,
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet
4. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer

2.2.6 Peran Internal Audit

Audit internal merupakan komponen pemantauan struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) suatu organisasi guna mengoordinasikan efektivitas aspek lain dari struktur SPIP (Arief, 2016). Pengendalian intern dikonklusi pada UU No. 15 Tahun 2004 meliputi seluruh proses audit mulai dari penelaahan penilaian, pengamatan, dan latihan pengawasan lainnya pada realisasi kapasitas instansi untuk memberikan konfirmasi positif bahwa latihan tersebut dilakukan layak dan cakap untuk mendapatkan skor GCG yang tinggi.

Apabila penugasannya adalah auditor internal yang merupakan Inspektorat Inspektorat yang professional menilai informasi keuangan, pelaksanaan dan kinerja, serta mengevaluasi dan mengevaluasi efektivitas kerja, maka peran audit internal adalah dinilai baik di mata aparatur/sumber daya manusia yang melaporkan keuangan. Audit intern/inspektorat berfungsi sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah, melakukan fungsi audit, evaluasi, dan pemantauan. Parameter yang digunakan dalam riset dapat dimanfaatkan untuk mengukur audit internal Adelia (2016) dengan kata lain:

1. Integritas
2. Obyektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi Aset Manusia dapat menjadi karakteristik yang mempengaruhi kualitas laporan terkait uang yang dibuat oleh pemerintah terdekat. Kompetensi Aset Manusia mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan latihan dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya berdasarkan instruksi, persiapan, dan keterlibatannya. Untuk membuat kerangka pembukuan, Organisasi Perangkat Teritorial (OPD) harus memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan yang memuaskan, dibuktikan dengan pendidikan dan persiapan yayasan, pengajaran dan persiapan kunjungan, atau kemampuan masa lalu di bidang keuangan.

Aset manusia (SDM) dengan kompetensi yang memuaskan akan mampu mendapatkannya dengan metode penalaran yang efektif. Karena aset manusia tidak memiliki informasi penting, penyiapan, dan keterlibatan dalam dana, mereka tidak mampu memahami alasan pembukuan, yang berdampak pada munculnya penjelasan terkait uang dan tidak sesuai dengan laporan dengan kebutuhan pemerintah. untuk kualitas laporan anggaran yang dibuat (2017, Triwardana). Berpedoman pada teori agensi, aset manusia harus memiliki kompetensi dalam memahami dengan yang diperlukan dalam pengaturan penjelasan terkait uang, seperti memahami bagian dan kapasitas administrasi terkait uang, melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas pembukuan yang sah, dan menerima persiapan dalam pembukuan.

perencanaan dan perencanaan artikulasi anggaran. Sependapat dengan Ningrum (2018), kompetensi aset manusia mengandung dampak yang bermanfaat dan patut

diperhatikan pada kualitas laporan terkait uang teritorial. Penyelidikan Hakim tentang (2017) juga menemukan bahwa peningkatan kompetensi aset manusia memajukan kualitas laporan anggaran pemerintah terdekat. Tentukan fokus pengambilan setelah berdasarkan pada pemikiran hipotetis dan temuan terbaru:

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SAP adalah aturan pembukuan yang digunakan dalam perencanaan dan pengenalan artikulasi moneter pemerintah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pedoman Pembukuan Pemerintah (SAP). Dalam lingkungan pemerintahan, SAP digunakan untuk mengevaluasi biaya pembuatan administrasi untuk terbuka tertarik, serta biaya administrasi dibebankan terbuka (Triwardana, 2017). Standar Akuntansi Pemerintah juga digunakan untuk menghilangkan asimetri informasi dengan menurunkan biaya ikatan. Karena penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat membantu menghilangkan kesalahan, maka Pemerintah Daerah harus bertindak untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Akibatnya, dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang kuat, dapat mengurangi timbulnya asimetri informasi dan memberikan laporan keuangan berkualitas tinggi. Menurut Hakim (2017), penggunaan SAP memiliki efek menguntungkan yang cukup besar, berpedoman penelitian. Sari dan Fadli mendukung temuan mereka (2017) Mereka dirumuskan sebagai berikut, berpedoman riset teoritis dan

temuan penyelidikan sebelumnya:

H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efisien akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan memenuhi fitur laporan keuangan. Sistem pengendalian internal juga memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku dipatuhi, laporan dan data keuangan akurat, dan kegiatan pemerintah efisien dan efektif (Ariyanto, 2020).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didasarkan pada teori keagenan inti yang digunakan untuk menganalisis tata kelola perusahaan (SPIP). Lebih lanjut Daniel menyatakan bahwa pemantauan melalui corporate governance yang efektif merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk mengendalikan konflik keagenan. Administrasi perusahaan dapat menjadi sebuah konsep yang menunjukkan untuk memajukan pelaksanaan perusahaan dengan mengikat atau mengikat bersama pelaksanaan administrasi dan memastikan kewajiban administrasi kepada mitra melalui aturan. Kerangka Pengawasan Orang Dalam Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh penting pada kualitas pengumuman terkait uang. Tentukan pengambilan setelah berdasarkan pertimbangan hipotetis dan temuan terbaru

H3 : Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Inovasi data dapat menjadi alat yang dapat menawarkan bantuan kemenangan pegangan dalam mencapai visi dan tujuan dalam administrasi moneter yang umum (Rahman, et al., 2015). ketersediaan inovasi data yang diharapkan dapat membantu otoritas pemerintah dalam membuat laporan anggaran pemerintah dan mempermudah pengolahan data keuangan secara metodis. Karena seluruh kegiatan administrasi anggaran akan dilaporkan lebih efisien dan pada akhirnya dapat ditampilkan dengan laporan keuangan daerah yang berkualitas, memanfaatkan teknologi data ini akan mengurangi berbagai kesalahan yang disebabkan oleh human error. Laporan kualitas akan dihasilkan dengan penggunaan teknologi yang lebih besar. Akuntabilitas publik diklasifikasikan teori keagenan adalah tanggung jawab wali (agent) dalam menjaga amanat (prinsipal) yang memiliki hak dan kewajiban menanggapi. wewenang untuk mengemban tugas tersebut (Latjandu dkk, 2016). Praktik pelaporan finansial di sektor publik merupakan gagasan yang didasarkan pada teori keagenan sehubungan dengan kesulitan keagenan. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menawarkan informasi yang relevan kepada konsumen data finansial pemerintah, yang menjadi prinsip evaluatif atas konklusi manajerial yang akan ditetapkan.

Relasional pemerintah dan pembeli data finansialisasi pemerintah dapat

dianggap sebagai hubungan kantor di bawah kekuasaan mayoritas pemerintahan populer. Klien data keuangan pemerintah bertindak sebagai prinsipal, dan pemerintah bertindak sebagai operator yang diizinkan untuk melaksanakan perintah tertentu yang diberikan oleh mereka, baik secara khusus maupun tidak melalui agen mereka. Dari sisi agensi, pemerintah sebagai yang utama harus bertindak untuk kepentingan terbaik pengguna informasi finansialisasi pemerintah.

Menurut teori *stewardship*, manajemen (*steward*) mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi lebih mementingkan kepentingan pemilik (*principal*). Dalam praktiknya, aparatur pemerintah akan melayani masyarakat sebagai pemilik (*principals*) di perusahaan sektor publik ketika pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan bersama, yaitu ketertiban pemerintahan yang bersih. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang berharga kepada pengguna dalam bentuk laporan terkait uang berkualitas yang memenuhi kualitas laporan anggaran memiliki dampak positif dan patut diperhatikan terhadap kualitas laporan terkait uang. Tentukan pengambilan setelah berdasarkan pertimbangan hipotetis dan temuan terbaru:

H4 : Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

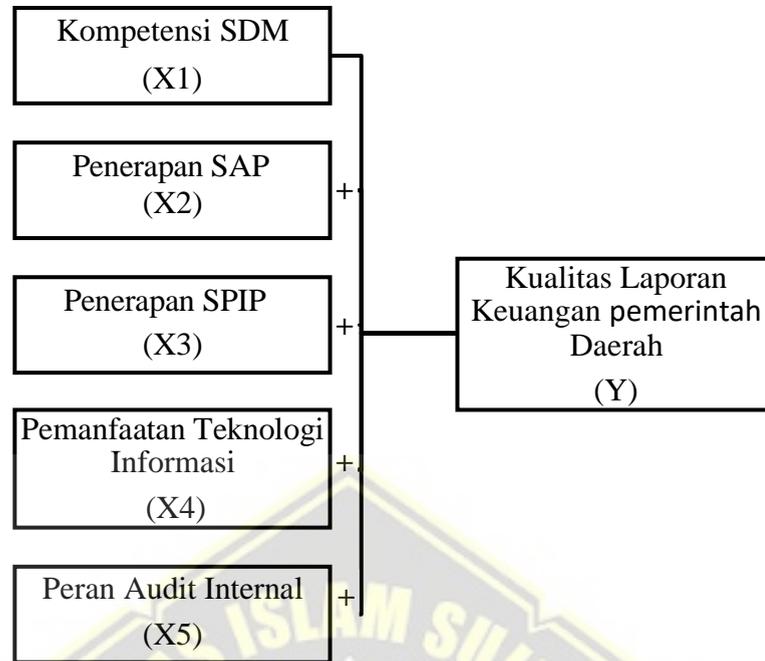
Baik dalam fungsi manajerial maupun dalam rangka pencapaian visi dan tujuan serta program pemerintah, auditor internal/Inspektorat pemerintah berfungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah (Riyadi, 2020). Pengendalian intern

dapat menunjukkan apakah suatu instansi pemerintah merealisasikan dengan efisien atas beragam tanggung jawab dan target yang ditetapkan dimana hal ini mampu mendorong dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas dengan adanya pengawasan intern tersebut. Akibatnya, profesionalisme dan objektivitas dalam mengevaluasi kinerja dan program auditor internal akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan 2017 (Nazaruddin & Syahrial). Pekerjaan tinjauan orang dalam mengandung dampak anggaran yang besar dan cukup besar pada kualitas laporan, sesuai dengan penelitian Nugroho & Setyowati (2019). Tinjauan batin memiliki dampak yang besar dan sangat luas pada kualitas laporan anggaran pemerintah terdekat, menyetujui investigasi Arief (2016). Tentukan fokus pengambilan setelah berdasarkan pada pemikiran hipotetis dan temuan terbaru:

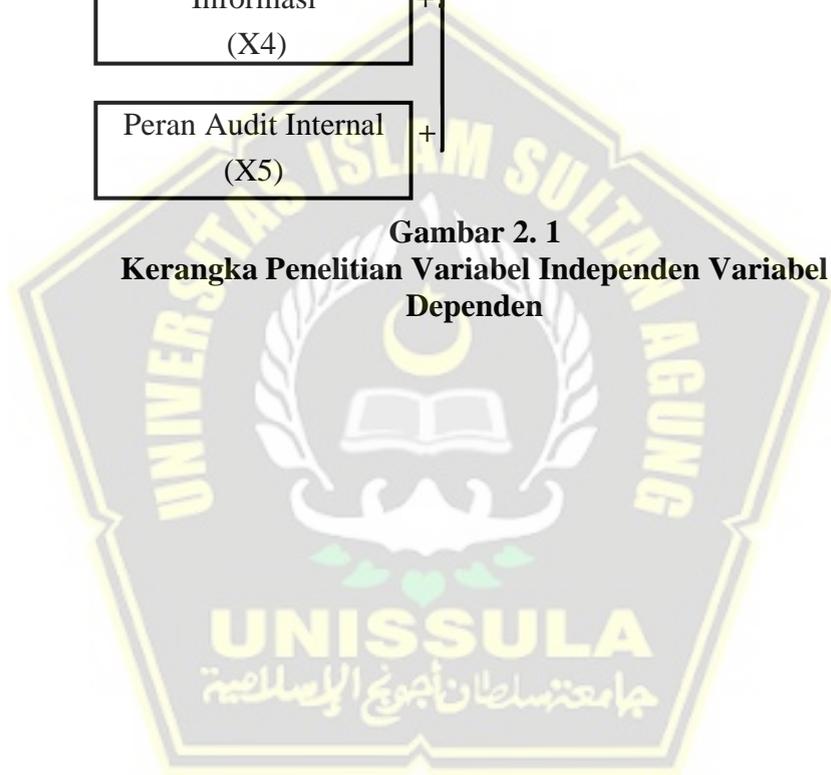
H5 : Pengaruh peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengertian agensi digunakan dalam riset ini. Hubungan kontak antara prinsipal dan agen dijelaskan oleh teori keagenan, di mana agen mengelola sumber daya sesuai dengan apa yang telah ditentukan prinsip dalam hubungan kontraktual. Perselisihan bisa muncul karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan utilitasnya. Agen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen informasi daripada prinsipal. Berpedoman uraian tersebut kerangka riset dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian Variabel Independen Variabel
Dependen



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Riset yang direalisasikan ini berjenis riset eksplanatori dimana realisasi dari studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi apakah variabel terbuca riset mampu memberikan nilai pengaruh kepada variabel dependen riset secara signifikan atau tidak. Metode analisa yang dipergunakan ialah analisa kuantitatif dengan basis aplikasi analisis SPSS.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi diklasifikasikan menjadi kuantitas objek riset secara garis besar dan menyerturur dimana kesatuan tersebut mempunyai nilai karakteristik dan sifat sejenis yang menjadikan periset menganalisa objek-objek tersebut. Populasi yang dipergunakan pada riset ini adalah semua Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang berada di wilayah Kabupaten Pati dengan total kuantitas 37 OPD yang terbagi menjadi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 8 Dinas, 3 Badan, 1 Kantor, 2 RSUD, dan 20 kecamatan. Sampel riset sendiri terklasifikasi sebagai sebagian kuantitas populasi yang dipilih sebagai bentuk perwakilan populasi (Sugiono, 2010). Sampel dalam riset ini ditentukan dengan mempergunakan metode sampel purposif dengan kriteria yang mencakup:

1. OPD yang sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah
2. OPD yang sudah mengaplikasikan teknologi informasi dalam menyampaikan laporan keuangan

Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel pada riset ini adalah OPD sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Kriteria Sampel OPD

Nama OPD	Nama OPD	Nama OPD
1. Sekretariat Daerah (Humas)	2. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	3. Kecamatan Juwana
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5. Dinas Perhubungan	6. Kecamatan Wedarijaksa
7. Inspektorat	8. Dinas Pertanian	9. Kecamatan Trangkil
10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11. Dinas Sosial	12. Kecamatan Batangan
13. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	14. Dinas Tenaga Kerja	15. Kecamatan Tayu
16. Dinas Kelautan Dan Perikanan	17. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	18. Kecamatan Margoyoso
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	20. Satuan Polisi Pamong Praja	21. Kecamatan Gunungwungkal
22. Dinas Kesehatan	23. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	24. Kecamatan Dukuhsekti
25. Dinas Komunikasi Dan Informatika	26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27. Kecamatan Cluwak
28. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30. Kecamatan Kayen
31. Dinas Lingkungan Hidup	32. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	33. Kecamatan Gabus
34. Dinas Ketahanan Pangan	35. Rumah Sakit Umum "Raa. Soewondo"	36. Kecamatan Tambakromo
37. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	38. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen	39. Kecamatan Sukolilo
40. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	41. Kecamatan Pati	42. Kecamatan Jakenan
43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	44. Kecamatan Margorejo	45. Kecamatan Jaken
46. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47. Kecamatan Tlogowungu	48. Kecamatan Winong
49. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	50. Kecamatan Gembong	51. Kecamatan Pucakwangi

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data riset ini berasal dari sekunder. Data sekunder adalah jenis informasi riset yang dikumpulkan melalui penggunaan media perantara (informasi yang diterima dan direkam oleh pihak ketiga) (Indriantoro dan Supomo, 2016). Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dan disusun langsung dari hal yang diteliti untuk tujuan riset. Tanggapan responden pada serangkaian pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang benar yang disediakan dalam kuesioner yang diberikan kepada responden digunakan untuk menghasilkan bentuk data riset ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pendekatan Kuesioner dipergunakan mengumpulkan data dalam riset ini. Pendekatan kuesioner ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang melibatkan pemberian kuesioner kepada responden terpilih dalam bentuk daftar tercetak untuk diisi dengan alternatif kuesioner yang tersedia. Periset akan mengirimkan kuesioner secara langsung kepada setiap responden yang telah dipilih.

3.5 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang dipergunakan dalam riset ini adalah variabel dependen (terikat), variabel independen (bebas).

3.5.1 Variabel Dependen (terikat)

Variabel ditentukan oleh jenis variabel yang digambarkan atau dipengaruhi oleh variabel otonom (Indriantoro dan Supomo, 2016). Kualitas Uang terkait Artikulasi dapat menjadi variabel dalam riset ini. Parameter kalkulatif laporan keuangan yang berkualitas diantaranya: (Hakim, 2017)

1. Laporan keuangan mampu menjabarkan informasi atas nilai transaksi yang lalu sebagai modal analisa lanjutan.
2. Transaksi dan pencatatan yang tertulis akurat serta sesuai dengan kenyataan.
3. Informasi keuangan yang ditulis mampu menjadi aspek pembanding dengan informasi pada laporan finansial periode lalu.
4. Informasi finansial yang tertulis mampu dimengerti dengan mudah oleh pengguna informasi.

3.5.2 Variabel Independen (bebas)

Variabel otonom dapat berupa variabel yang tidak mempengaruhi atau memperjelas faktor lain (Indriantoro dan Supomo, 2016). Kompetensi SDM, Implementasi SAP, Implementasi SPIP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Internal Audit merupakan faktor independen dalam riset ini.

3.5.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kapasitas individu atau, organisasi, atau kerangka kerja untuk melakukan latihan atau spesialis untuk mewujudkan tujuan dengan sukses dan efektif disebut sebagai kompetensi aset manusia (Pangestu, et.al, 2019). Berpedoman beberapa definisi di atas maka periset mempergunakan indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan 3 indikator menurut riset (Ningrum, 2018) yaitu:

1. Pendidikan,
2. Tanggung Jawab
3. Pelatihan,
4. Pengalaman

3.5.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penerapan Pedoman Pembukuan Pemerintah yang disingkat SAP adalah tindakan pembukuan yang digunakan dalam pengaturan dan pengenalan penjelasan terkait uang negara, menyetujui Instruksi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Pebriani 2019). Sebelas parameter dipergunakan untuk menilai penerapan suatu sistem akuntansi, antara lain:

1. Penyajian Laporan Keuangan : Pengakuan basis akrual untuk aset, kewajiban, ekuitas dan Pengakuan basis kas untuk kewajiban,
2. Laporan Realisasi Anggaran : Menyajikan LRA berbasis kas, Mencatat pendapatan berdasar asas bruto, Pengakuan belanja saat pengeluaran, Penerimaan pembiayaan.

3. Laporan Arus Kas : Menyajikan LRA sesuai SAP, Arus kas dari aktivasi operasi dengan metode langsung.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Akuntansi Persediaan : Pengakuan Persediaan dan Pencatatan Persediaanberdasar inventarisasi fisik.
6. Akuntansi Investasi : Pengakuan kas setelah dilakukan investasi, Penilaian investasi dengan metode biaya dan metode ekuitas
7. Akuntansi Aset Tetap : Pengklasifikasian aset tetap dalam operasi entitas,penilaian aset tetap.
8. Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
9. Akuntansi Kewajiban : Pengakuan dan Pencatatan kewajiban.
10. Koreksi Kesalahan : Koreksi setiap kesalahan berdasar SAP melalui pembetulan pos-pos neraca terkait.
11. Laporan Keuangan Konsolidasi : Penyajian LKK untuk periodepelaporan yang sama dengan entitas pelaporan, dan LKK mencakup semua entitas akuntansi (Sari & Fadli, 2017).

3.5.5 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah pegangan lengkap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan dan pekerjaan untuk melakukan kegiatan dan latihan untuk mencapai tujuan melalui operasi yang sukses dan mahir, pengumuman moneter, keamanan sumber daya, dan kepatuhan terhadap arahan (PP). 63 Tahun 2008, tentang SPI). Penggunaan sistem pengendalian internal dievaluasi dengan menggunakan 5 parameter indikator mencakup (Pitaloka, et.al (2020):

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi Dan Komunikasi
5. Pemantauan

3.5.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

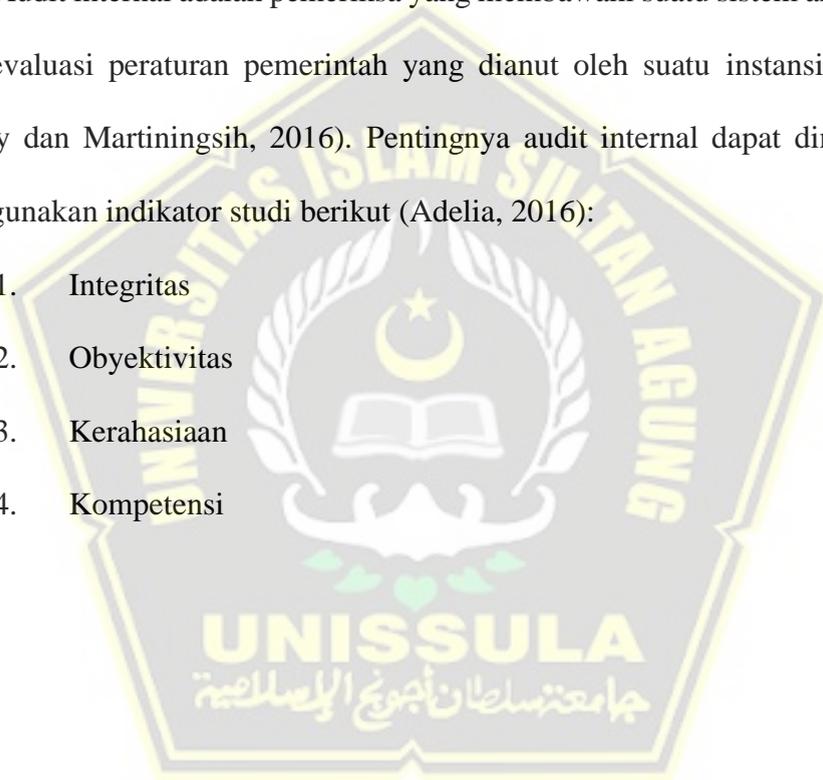
Kondisi pembukuan yang memanfaatkan inovasi data untuk memenuhi pesanan dan melakukan eksekusi langkah dikenal sebagai pemanfaatan inovasi data. Pemanfaatan inovasi data meliputi (a) penanganan informasi elektronik, penyiapan data, kerangka kerja administrasi, dan metode kerja, dan (b) pemanfaatan inovasi data untuk menciptakan administrasi terbuka yang lebih tersedia dan wajar untuk dibuka (Harnoni, 2016). Pemanfaatan teknologi Informasi dievaluasi melalui beberapa parameter antara lain:

1. Proses kerja secara elektronik,
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan,
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet dan
4. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer (Wardani et al., 2018)

3.5.7 Peran Audit Internal

Audit internal adalah pemeriksa yang membawahi suatu sistem akuntansi dan mengevaluasi peraturan pemerintah yang dianut oleh suatu instansi pemerintah (Inapty dan Martiningsih, 2016). Pentingnya audit internal dapat dinilai dengan menggunakan indikator studi berikut (Adelia, 2016):

1. Integritas
2. Obyektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi



Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat diiktisarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Definisi Operasional dan Pengukuran

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Kualitas Laporan Keuangan	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010)	1. relevan, 2. andal, 3. dapat diandalkan, 4. dapat dipahami(Hakim, 2017)
2.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Pangestu, et.al, 2019).	1. Pendidikan 2. tanggung jawab, 3. pelatihan, 4. pengalaman (Ningrum,2018)
3.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pebriani 2019)	1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Akuntansi Persediaan 6. Akuntansi Investasi 7. Akuntansi Aset Tetap 8. AkuntansiKontruksi dalam Pengerjaan 9. Akuntansi Kewajiban 10. Koreksi Kesalahan 11. Laporan Keuangan Konsolidasi (Sari & Fadli, 2017)
4.	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP No. 63 Tahun 2008 tentang SPI)	1. lingkungan pengendalian, 2. penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. informasi dan komunikasi, 5. pemantauan (Pitaloka, et.al (2020)
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. (Harnoni,2016)	1. tingkat kecepatan, 2. tingkat keamanan, 3. tingkat efisiensi biaya, 4. tingkat kualitas hasil (Sari & Fadli, 2017)
6.	Peran Internal Audit	Pemeriksa yang berperan dalam mengawasi, mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan pemerintah yang	1. Integritas 2. Obyektivitas 3. Kerahasiaan 4. Kompetensi (Adelia, 2016)

3.6 Teknik Analisis

Data terkolektif pada riset ini dianalisa melalui metode statistik antara lain:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik dipergunakan dalam riset untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel riset.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengetesan validasi instrumen riset dipergunakan untuk memperoleh konklusi apakah kuesioner riset selaku instrumen mampu memberikan pengklasifikasikan yang tepat serta memenuhi keabsahan dari variabel riset yang dianalisa. Indikasi atas mampu tidaknya insturumen dinyatakan lolos sebagai instrumen valid adalah nilai r-hitung dimana kalkulasi r-hitung lebih tinggi dari r-tabel menjadi parameter mutlak.

2. Uji Reliabilitas

Pengetesan reliabilitas riset dipergunakan guna menganalisa nilai dari konsistensi instrumen kuesioner dari periode waktu ke periode lanjutan (Ghozali, 2011). Indikasi atas mampu tidaknya instrumen riset memenuhi reliabilitas adalah koefisien cronbach alpha instrumen yang dihasilkan harus lebih tinggi dari 0,60.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Pengetesan normalitas diterapkan untuk mengidentifikasi nilai persebaran data di dalam model riset dimana nilai data yang tersebar normal akan memudahkan

hasil riset yang semakin akurat. Analisa normalisasi data riset dipedomankan pada nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi dimana nilai sig diatas 5 % menjadi parameter bahwa data-data kuantitatif riset tersebar normal.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengetesan uji heterokedastisitas model riset dipergunakan guna menganalisa lolos tidaknya model riset yang digunakan dari masalah heterokedastisitas. Identifikasi uji heterokedastisitas dipedomankan dari nilai signifikansi Glestjer dimana nilai sig Glestjer lebih dari 5 persen menjadi indikasi bahwa model riset bebas heterokedastisitas.

3.6.3.3 Uji Multikolinieritas

Pengetesan multikolinieritas dipergunakan untuk mengidentifikasi potensi atas adanya korelasi antara variabel independen. Identifikasi nilai multikolinieritas model riset dipedomankan atas nilai inflasi faktor varian beserta tolerance dengan kriteria lolos uji multikolinieritas ketika nilai VIF kurang dari 10,00 dan tolerance di atas 10 %. Nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Analisa uji hipotesis riset dimaksudkan untuk mengidentifikasi dugaan riset ilmiah terbukti secara konklusif atau tidak. Terbukti tidaknya hipotesis dipedomankan atas nilai indeks kalkulasi ketepatan pengukuran dimana nilai batas terbuktinya hipotesis adalah sebesar 95 % (Ghozali, 2011:98) dan nilai kalkulatif sebesar 95 % ini membuktikan dugaan ilmiah atau hipotesis riset yang diajukan terbukti diterima.

3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis regresi berganda pada riset ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah = Konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi;

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia;

X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ;

X_3 = Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

X_4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi;

X_5 = Peran Audit Internal;

ε = Kesalahan Pengganggu (*error*)

3.6.5 Uji Kebaikan Model

3.6.5.1 Uji F

Analisa uji F diajukan untuk mengetahui baik tidaknya model regresi riset yang diajukan dimana nilai indeks F tersebut memiliki batas maksimal 5 % untuk memperoleh asumsi bahwa model regresi riset tergolong baik. Hasil berlaku sebaliknya ketika nilai batas kesalahan maksimal kalkulasi lebih dari 5 %.

3.6.5.2 Koefisien Determinasi

Konklusi analisa *determinan value* diajukan untuk mengidentifikasi seberapa kuat kapabilitas aspek eksogen untuk tiap model regresi riset dalam menjabarkan nilai aspek endogennya. Nilai determinan yang tinggi menandakan kapabilitas penjabaran aspek eksogen tinggi. Hasil berlaku sebaliknya ketika nilai

determinan semakin rendah sehingga tingkat keakurasian penjabaran menjadi rendah yang berpotensi menimbulkan kelemahan hasil riset.

3.6.5.3 Uji t

Uji hipotesis riset dimaksudkan untuk mengetahui apakah dugaan riset ilmiah terbukti secara konklusif atau tidak. Terbukti tidaknya hipotesis dipedomankan atas nilai indeks kalkulasi ketepatan pengukuran dimana nilai batas terbuktinya hipotesis adalah sebesar 95 % (Ghozali, 2011:98) dan nilai kalkulatif sebesar 95 % ini membuktikan dugaan ilmiah riset diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Sampel

Riset ini direalisasikan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati dengan menyebar kuisioner kepada 63 responden di 37 OPD Kabupaten Pati. Pembagian dan pengambilan kuisioner ditunjukkan oleh table dibawah 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 1
Rincian Pengembalian dan Pengiriman Kuisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisioner disebar	111
Kuisioner kembali	63
Kuisioner tidak kembali	0
Kuisioner diolah	63

Responden Rate: $63/111 * 100\% = 57\%$ Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berpedoman tabel 4.1 diatas diketahui kuisioner yang disebar kepada para OPD sebanyak 111 lembar kuesioner. Dari 111 lembar kuesioner tersebut terdapat 63 lembar kuesioner yang terbukti terisi dan dapat dilakukan rekap kembali oleh pihak peneliti. Sementara 48 lembar kuesioner justru tidak diisi dengan lengkap maupun tidak dikembalikan ke pihak peneliti oleh para OPD Kabupaten Pati selaku responden riset.

Untuk penjelasan terkait sampel riset secara lebih lanjut dijabarkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	%
Jenis Kelamin		
Pria	31	49%
Wanita	32	51%
Usia		
<30 tahun	15	24%
30-40 tahun	25	40%
> 40 tahun	23	37%
Jabatan		
Bendahara	22	35%
Kasubag keuangan	19	30%
Staf bagian keuangan	22	35%
Pendidikan terakhir		
Diploma	10	16%
S1	39	62%
S2	14	22%

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman atas Tabel 4.2 mengenai karakteristik responden diketahui jumlah OPD Kabupaten Pati lebih didominasi oleh wanita dengan jumlah sebanyak 32 OPD sementara OPD pria berjumlah 31 orang. Ini menjadi indikasi bahwa staff bagian akuntansi lebih dipercayakan pada karyawan wanita karena pihak instansi berasumsi nilai ketelitian yang dimiliki wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki sehingga jumlah staff akuntansi cenderung didominasi wanita. Dari segi usia teridentifikasi bahwa karyawan dengan usia 30 hingga 40 tahun berjumlah paling dominan yaitu sebanyak 25 orang sementara karyawan dengan usia dibawah 30 tahun berjumlah minoritas. Ini artinya sebagian besar OPD yang menjadi responden riset memiliki nilai pengalaman kerja yang jauh lebih tinggi karena sudah memasuki usia 30 hingga 40 tahun yang mengindikasikan bahwa pihak OPD

tersebut telah bekerja selama bertahun-tahun untuk instansi yang bersangkutan. Untuk OPD dengan usia dibawah 30 tahun berjumlah minoritas sehingga mengindikasikan bahwa OPD yang memiliki nilai waktu pengalaman kerja rendah jauh lebih sedikit. Dari segi jabatan jumlah bendahara serta staff bagian keuangan lebih mendominasi dengan jumlah masing-masing sebanyak 22 OPD. Ini artinya lembar kuesioner yang dibagikan lebih banyak diisi secara lengkap oleh OPD pada bagian bendahara serta staff bagian keuangan dibandingkan OPD yang merupakan Kasubag bagian keuangan.

Dilihat dari segi pendidikan terakhir, jumlah karyawan yang merupakan tamatan pendidikan S1 berjumlah paling dominan yaitu 39 orang sementara karyawan dengan tamatan pendidikan diploma berjumlah paling sedikit yaitu 10 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar OPD yang menjadi sampel riset merupakan pihak-pihak yang ahli di dalam konteks pengelolaan keuangan karena merupakan tamatan sarjana S1 sehingga kapabilitas ilmu yang dimiliki tergolong jauh lebih baik sehingga mampu menghasilkan nilai kinerja yang baik bagi instansi. Karakteristik responden berpedoman jenis kelamin, jenis kelamin sering dijadikan sebagai pembeda di suatu pekerjaan tertentu.

Berpedoman tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan OPD Kabupaten Pati di dominasi oleh pegawai perempuan dengan jumlah 32 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 31 orang, yang dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pegawai di dominasi oleh pegawai berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berpedoman jenis pendidikan, jenis pendidikan secara tidak langsung berpengaruh terhadap

pengalaman, pengetahuan dan skill pegawai tersebut, dalam hasil karakteristik table di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai paling banyak dengan jenis pendidikan S1 dengan jumlah pegawai sebesar 39 orang.

4.2 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang mengacu beberapa jauh ukuran empiris yang cukup melukiskan arti dari konsep sebenarnya yang sedang diteliti. Maka dapat diartikan bahwa, suatu pengukuran dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur (Marissan, 2012).

4.2.1 Pengaruh Kompetensi SDM

Berpedoman hasil kalkulasi uji validitas variabel Kompetensi SDM sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Pengaruh Kompetensi SDM

No	Nilai Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,944	0,002	0,245	Valid
2	0,802	0,000	0,245	
3	0,946	0,000	0,245	
4	0,957	0,000	0,245	

Sumber: Data primer yang di olah 2021

Berpedoman tabel 4.3 teridentifikasi semua instrumen aspek Kompetensi SDM memenuhi seluruh klasifikasi keabsahan dikarenakan nilai r_{hitung} didapatkan lebih tinggi dari r_{tabel} .

4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berpedoman hasil perhitungan uji validitas variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas Pengaruh SAP

No	Nilai Corrected Item Total Correlation / R_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,898	0,000	0,245	Valid
2	0,797	0,000	0,245	
3	0,835	0,000	0,245	
4	0,877	0,000	0,245	
5	0,828	0,000	0,245	
6	0,886	0,000	0,245	
7	0,827	0,000	0,245	
8	0,793	0,000	0,245	
9	0,819	0,000	0,245	
10	0,808	0,000	0,245	
11	0,784	0,000	0,245	
12	0,827	0,000	0,245	

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman tabel 4.4 teridentifikasi teridentifikasi semua instrumen aspek SAP memenuhi seluruh klasifikasi keabsahan dikarenakan nilai r hitung didapatkan lebih baik dari r tabel.

4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Berpedoman hasil kalkulasi uji validitas variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP):

Tabel 4. 5
Hasil Uji Validitas Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

No	Total Correlation / R_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Kriteria
1	0,620	0,000	0,245	Valid
2	0,939	0,000	0,245	
3	0,854	0,000	0,245	
4	0,944	0,000	0,245	
5	0,923	0,000	0,245	

Sumber: Data primer yang di olah 2021

Berpedoman tabel 4.5, teridentifikasi teridentifikasi semua instrumen aspek SPIP memenuhi seluruh klasifikasi keabsahan dikarenakan nilai r hitung yang didapatkan lebih tinggi dari r tabel.

4.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berpedoman hasil perhitungan uji validitas variable Pemanfaatan teknologi Informasi sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi informasi

No	Total Correlation / R_{hitung}	Sig.	R_{tabel}	Kriteria
1	0,867	0,000	0,245	Valid
2	0,915	0,000	0,245	
3	0,923	0,000	0,245	
4	0,844	0,000	0,245	

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman tabel 4.6, teridentifikasi semua instrumen aspek pemanfaatan teknologi informasi memenuhi seluruh klasifikasi keabsahan dikarenakan nilai r hitung yang didapatkan lebih tinggi dari r tabel.

4.2.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan

Berpedoman hasil perhitungan uji validitas variable Kualitas Laporan Keuangan 4 item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

No	ilai CorrectedItem Total Correlation / Rhitung	Sig.	r _{tabel}	Kriteria
1	0,885	0,000	0,245	Valid
2	0,752	0,006	0,245	
3	0,964	0,000	0,245	
4	0,965	0,008	0,245	

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman tabel 4.7 teridentifikasi semua instrumen aspek kualitas laporan keuangan memenuhi seluruh klasifikasi keabsahan dikarenakan nilai r hitung yang didapatkan lebih tinggi dari r tabel.

4.3 Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas kuesioner dengan cara mempergunakan teknik *cronbach Alpha*. Menurut Nunaly (1963) dalam (Ghozali 2011) menjabarkan bahwa pada dasarnya variable atau konstruk terklasifikasi reliabl apabila nilai *cronbach Alpha* menghasilkan angka \geq dari (0.6).

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas

No	Nama ariabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Minimal	keterangan
1	mpetensi SDM	0,935	0,6	reliabel
2	erapan SAP	0,959	0,6	reliabel
3	em Pengendalian Internal Pemerintahan IP)	0,908	0,6	reliabel
4	manfaat teknologi ormasi	0,897	0,6	reliabel
5	an Audit Internal	0,909		
6	ilitas laporan angan	0,913	0,6	reliabel

Sumber: data primer yang diolah 2021

Nilai croncbch alpha yang diperoleh dengan analisis reliabilitas pada setiap variabel lebih tinggi dari kriteria. Jika nilai alpha lebih dari 0,6, instrumen dianggap dapat diandalkan, menyiratkan bahwa semua variabel sangat andal. Hasilnya, semua uji instrumen yang meliputi validitas dan reliabilitas memenuhi kriteria untuk dipergunakan sebagai determinasi keputusan riset.

4.4 Analisis Deskriptif

Keterkaitan antara skor tertinggi pada setiap variabel dan jumlah item pertanyaan pada setiap variabel dapat digunakan untuk menentukan identitas frekuensi masing-masing variabel, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori: sangat tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dengan menggunakan rumus perhitungan interval (I), hitung nilai interval untuk mengidentifikasi kategori responden terhadap variabel penelitian:

$$I = \frac{\text{Nilai Maksimal Skala Likert} - \text{Nilai Minimal Skala Likert}}{\text{Jumlah Kelas yang Ditentukan}}$$

$$I = \frac{5 - 1}{5}$$

$$I = \frac{4}{5}$$

$$I = 0,8$$

Berpedoman atas penghitungan nilai interval dari kalkulasi tersebut maka diketahui nilai interval yang digunakan sebesar 0,8 sehingga interpretasi penilaian kelas yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

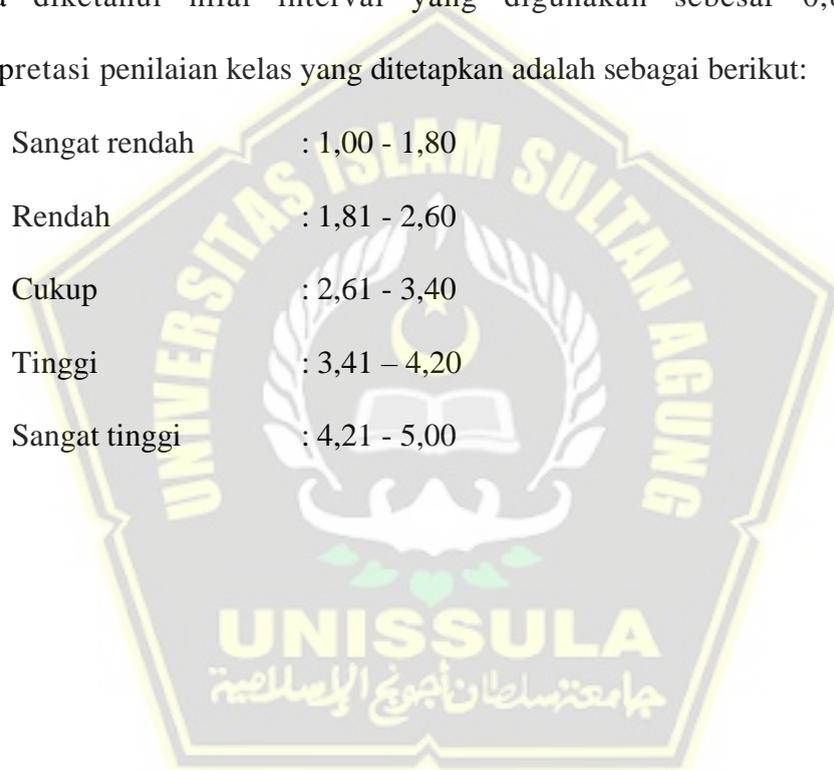
Sangat rendah : 1,00 - 1,80

Rendah : 1,81 - 2,60

Cukup : 2,61 - 3,40

Tinggi : 3,41 - 4,20

Sangat tinggi : 4,21 - 5,00



4.4.1 Deskripsi Variabel Kompetensi SDM

Deskripsi tanggapan pegawai mengenai penerapan SAP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Tentang Kompetensi SDM

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
pendidikan,	0	0	15	30	11	33	37	148	0	0	3,35	Cukup
Pelatihan	0	0	10	20	35	105	18	72	0	0	3,13	Cukup
Pengalaman	0	0	12	24	16	48	35	140	0	0	3,37	Cukup
Tanggung jawab	0	0	14	28	11	33	38	152	0	0	3,38	Cukup
Rata-rata											3,31	Cukup

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman tabel di atas menunjukkan variable Kompetensi SDM memiliki rata-rata sebesar 3,31 yang berarti hasil riset pada variable ini sangat tinggi. Tanggapan tertinggi dari responden adalah di indikator “tanggung jawab” sebesar 3,38, konklusi ini berarti bahwa pegawai mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam mengkoreksi laporan keuangan sehingga bisa menjadi laporan keuangan yang baik. Tanggapan terendah diperoleh pada indikator “pelatihan” sebesar 3,13 hal ini membuktikan bahwa pelatihan yang diikuti petugas belum dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi petugas.

4.4.2 Deskripsi Variabel Penerapan SAP

Deskripsi tanggapan pegawai mengenai penerapan SAP adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Tanggapan Responden Tentang SAP

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Penyajian Laporan Keuangan	0	0	4	8	16	48	43	172	0	0	3,62	baik
Laporan Realisasi Anggaran	0	0	3	6	15	45	45	180	0	0	3,67	baik
Laporan Realisasi Anggaran	0	0	3	6	24	72	36	144	0	0	3,52	baik
Laporan Arus Kas	0	0	4	8	17	51	42	168	0	0	3,60	baik
Catatan atas Laporan Keuangan	0	0	3	6	14	42	46	184	0	0	3,68	baik
Akuntansi Persediaan	0	0	3	6	20	60	40	160	0	0	3,59	baik
Akuntansi Investasi	0	0	3	6	22	66	38	152	0	0	3,56	baik
Akuntansi Aset Tetap	0	0	4	8	15	45	44	176	0	0	3,63	baik
Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan	0	0	4	8	19	57	40	160	0	0	3,57	baik
Akuntansi Kewajiban	0	0	3	6	14	42	46	184	0	0	3,69	baik
Koreksi Kesalahan	0	0	2	4	25	75	36	144	0	0	3,54	baik
Laporan Keuangan Konsolidasi	0	0	3	6	22	66	38	152	0	0	3,56	baik
	Rata-rata										3,60	baik

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman table di atas menunjukkan bahwa variable Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki rata-rata sebesar 3,60 yang berarti hasil riset pada variable ini tinggi. Tanggapan tertinggi dari responden adalah di indikator “akuntansi kewajiban” sebesar 3,68, hal ini membuktikan bahwa mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima. Tanggapan terendah diperoleh pada indikator “Laporan Realisasi Anggaran” sebesar 3,52 hal ini membuktikan bahwa

banyak pegawai yang tidak mengerjakan LAK sesuai dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

4.4.3 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan, deskripsi repon pegawai adalah Sebagai Berikut:

Tabel 4. 11
Tanggapan Responden Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
lingkungan pengendalian,	0	0	17	34	45	135	1	4	0	0	2,75	cukup
penilaian resiko,	0	0	16	32	30	90	17	68	0	0	3,02	cukup
Kegiatan pengendalian,	0	0	18	36	41	123	4	16	0	0	2,78	cukup
informasi dan komunikasi,	0	0	17	34	30	90	16	64	0	0	2,98	cukup
Pemantauan	0	0	18	36	44	132	1	4	0	0	2,73	cukup
	Rata-rata										2,85	cukup

Sumber: data primer diolah 2021

Berpedoman tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata atas jawaban responden tersebut sebesar 2,85 yang berarti variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) memiliki rata-rata yang cukup tinggi. Skor tertinggi diperoleh pada indikator “penilaian resiko” sebesar 3,02. Untuk skor terendah di peroleh pada indikator “pemantauan” sebesar 2,73, hal ini membuktikan kurangnya dukungan pimpinan untuk selalu melakukan evaluasi pelaporan secara berkelanjutan.

4.4.4 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel ini di ukur dengan 5 pertanyaan. Berikut merupakan hasiljawaban responden:

Tabel 4. 12
Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Proses kerja secara elektronik,	0	0	0	0	5	15	58	232	0	0	3,92	Baik
Pengolahan dan penyimpanan data keuangan,	0	0	0	0	25	75	38	152	0	0	3,60	Baik
Pengolahan informasi dengan jaringan internet	0	0	0	0	16	48	47	188	0	0	3,75	Baik
Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer	0	0	0	0	26	78	37	148	0	0	3,59	baik
Proses kerja secara elektronik,	0	0	0	0	18	54	45	180	0	0	3,71	baik
Rata-rata											3,71	baik

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berpedoman hasil tanggapan responden diatas Pemanfaatan Teknologi Informasi memperoleh rata-rata sebesar 3,71 yang berarti pemanfaatan teknologi informasi di OPD Kabupaten Pati termasuk baik. Dengan skor tertinggi yaitu pada indikator “Proses kerja secara elektronik” sebesar 3,92 ini memperlihatkan bahwa teknologi informasi yang di sediakan dapat mempercepat proses pembuatan laporan keuangan, sedangkan skor terendah yaitu pada indaktor “Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer” sebesar 3,59. Hal ini di sebabkan karena pegawai kurang menguasai dan memahami tentang perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer dalam pemanfaatan teknologi informasi di OPD Kabupaten Pati.

4.4.5 Deskripsi Variabel Peran Audit Internal

Variabel ini di ukur dengan 4 pertanyaan. Berikut adalah hasil deskripsi respon pegawai:

Tabel 4. 13
Tanggapan Responden Tentang Peran Audit Internal

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Integritas,	0	0	13	39	29	116	21	105	0	0	4,13	baik
Obyektivitas,	0	0	15	45	30	120	18	90	0	0	4,05	baik
Kerahasiaan,	0	0	15	45	30	120	18	90	0	0	4,05	baik
Kompetensi	0	0	23	69	26	104	14	70	0	0	3,86	baik
Rata-rata											4,02	baik

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berpedoman hasil tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa variable Peran Audit Internal mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,02 yang berarti hasil riset ini menunjukkan bahwa Peran Audit Internal yang ada di OPD Kabupaten Pati adalah baik. Skor tertinggi yaitu 4,13 pada indikator “integritas” yang berarti Auditor internal merealisasikan tugasnya dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan skor terendah yaitu 3,86 pada indikator “kompetensi”, hal ini dapat membuktikan bahwa kesediaan audit internal untuk terus-menerus menaikan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan masih dinilai kurang dalam menunjang laporan keuangan daerah.

4.4.6 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel ini di ukur dengan 4 pertanyaan, hasil deskripsi jawaban yang di berikan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Laporan Keuangan

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Relevan	0	0	8	16	28	84	27	108	0	0	3,30	cukup
Andal	0	0	15	30	22	66	26	104	0	0	3,17	cukup
Dapat dibandingkan	0	0	14	28	22	66	27	108	0	0	3,21	cukup
Dapat dipahami	0	0	14	28	21	63	28	112	0	0	3,22	cukup
	Rata-rata										3,23	cukup

Sumber: data primer yang di olah 2021

Dari hasil deskripsi sesuai dengan table 4.14 di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan memperoleh nilai rata-rata 3,23 yang berada di OPD Kabupaten Pati berarti cukup baik. Untuk skor tertinggi yaitu pada indikator “relevan” sebesar 4,38 hal ini menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pegawai mampu dipergunakan menjadi aspek prediktif (*predictive value*). Untuk skor terendah yaitu pada indikator “andal” sebesar 3,17 yang berarti bahwa pegawai membuat laporan keuangan dengan baik tetapi belum konsisten atau sistematis dan masih belum bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Pengetesan normalitas diterapkan untuk mengidentifikasi nilai persebaran data di dalam model riset dimana nilai data yang tersebar normal akan memudahkan hasil riset yang semakin akurat. Analisa normalisasi data riset dipedomankan pada nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi dimana nilai sig diatas 5 % menjadi parameter bahwa data-data kuantitatif riset tersebar normal:

Tabel 4. 15
Hasil Uji One-sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	63
Mean	,0000000
Std. Deviation	1,03319052
Most Extreme Differences	,052
Positive	,040
Negative	-,052
Test Statistic	,052
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber: data primer diolah 2021

Berdasarkan informasi pengujian di atas, pada uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) muncul tingkat sig. (2-tailed) atau diperhatikan pada 0,200 lebih penting dari 0,05 maka informasi tersebut diucapkan biasanya tersebar. Nilai kritis $>0,05$ menunjukkan bahwa semua faktor variabel riset memiliki tingkat kritis 0,200. Dalam suatu demonstrasi relaps dapat dikatakan baik jika informasi tersebut disebarkan secara teratur.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Pengetesan multikolinieritas dipergunakan untuk mengidentifikasi potensi atas adanya korelasi antara variabel independen. Identifikasi nilai multikolinieritas model riset dipedomankan atas nilai inflasi faktor varian beserta tolerance dengan hasil sebagaimana demikian

Tabel 4. 16
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.5,268	1,573		-3,350	,001		
	Kompetensi SDM	,263	,087	,277	3,027	,004	,301	3,321
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,073	,035	,157	2,056	,044	,434	2,304
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	,196	,063	,186	3,112	,003	,706	1,416
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,244	,093	,165	2,622	,011	,636	1,572
	Peran Audit Internal	,350	,090	,335	3,882	,000	,338	2,963

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berpedoman konklusi uji Multikolinieritas memperlihatkan nilai statistik kolinieritas pada variabel riset memenuhi klasifikasi lolos uji multikolinieritas sehingga terkonklusi model riset terbebas dari masalah asumsi ini.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengetesan uji heterokedastisitas model riset dipergunakan guna menganalisa lolos tidaknya model riset yang digunakan dari masalah heterokedastisitas. Identifikasi uji heterokedastisitas dipedomankan dari nilai signifikansi Glestjer dimana nilai sig Glestjer lebih dari 5 persen menjadi indikasi bahwa model riset bebas heterokedastisitas.

Tabel 4. 17
Konklusi Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,550	,910		1,690	,090
	Kompetensi SDM	-,010	,050	-,060	-,260	,790
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	-,000	,020	-,000	-,020	,970
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	,020	,030	,080	,550	,570
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-,010	,050	-,050	-,330	,740
	Peran Audit Internal	-,040	,050	-,160	-,760	,440

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman tabel 4.11 konklusi uji heteroskedaktisitas memperlihatkan keempat variable riset yaitu Kompetensi SDM (X1), Penerapan PSAP (X2), Pengenalian Intern (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), dan Peran Audit Internal (X5), masing-masing memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 atau 5%. Konklusipengetesan heteroskedaktisitas menyatakan bahwa model regresi tidak terindikasi atau bebas dari gejala heteroskedaktisitas.

4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut tabel konklusif analisa regresi linear berganda:

Tabel 4. 18
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5,268	1,573		-3,350	,001		
	Kompetensi SDM	,263	,087	,277	3,027	,004	,301	3,321
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,073	,035	,157	2,056	,044	,434	2,304
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	,196	,063	,186	3,112	,003	,706	1,416
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,244	,093	,165	2,622	,011	,636	1,572
	Peran Audit Internal	,350	,090	,335	3,882	,000	,338	2,963

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : data primer yang diolah 2021

Berpedoman konklusi uji regresi linier berganda, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \\
 &= -5,268 + 0,277 \text{ KSDM} + 0,157 \text{ PSAP} + 0,186 \text{ SPIP} + 0,165 \text{ IT} + 0,335 \\
 &\quad \text{PAI} + e
 \end{aligned}$$

Berpedoman rumus regresi untuk variable kompetensi SDM, penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi teknologi, dan Peran Internal Audit Terhadap kualitas laporan keuangan dapat di terangkan bahwa:

1. Nilai konstanta senilai -5,268, dengan nilai sig nya senilai 0,001, hal ini menyatakan bahwa konstanta dianggap 0. Artinya jika semua variable independent dianggap tetap maka kualitas laporan keuangan bernilai -5,268.
2. Nilai koefisien X1 senilai 0,277 dengan nilai signifikan senilai 0,004

hal ini berarti kompetensi SDM menaikkan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik kompetensi SDM maka nilai kualitas laporan keuangan naik.

3. Nilai koefisien X2 senilai 0,157 dengan nilai signifikan senilai 0,044 hal ini berarti SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik SAP maka nilai kualitas laporan keuangan yang dikonklusikan naik.
4. Nilai koefisien X3 senilai 0,186 dengan nilai signifikan senilai 0,003 hal ini berarti Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) akan menaikkan nilai kualitas laporan keuangan.
5. Nilai koefisien X4 senilai 0,165 dengan nilai signifikan senilai 0,011 hal ini dapat di artikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Sistem Pemanfaatan Teknologi Informasi yang tinggi menaikkan nilai kualitas laporan keuangan.
6. Nilai koefisien X5 senilai 0,335 dengan tingkat signifikan senilai 0,000 yang dimana tingkat signifikan diatas 0,05 hal ini dapat di artikan bahwa peningkatan Peran audit internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

4.7 Uji Goodness of Fit

4.7.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji hipotesis riset dimaksudkan untuk mengetahui apakah dugaan riset ilmiah terbukti secara konklusif atau tidak. Terbukti tidaknya hipotesis dipedomankan atas nilai indeks kalkulasi ketepatan pengukuran dimana nilai batas terbuhtinya hipotesis adalah sebesar 95 % (Ghozali, 2011:98) dan nilai kalkulatif sebesar 95 % ini membuktikan dugaan ilmiah riset diterima.:

Tabel 4. 19
Hasil Uji Hipotesis Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1.	(Constant)	-5,268	1,573		-3,350	,001		
	Kompetensi SDM	,263	,087	,277	3,027	,004	,301	3,321
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,073	,035	,157	2,056	,044	,434	2,304
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	,196	,063	,186	3,112	,003	,706	1,416
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,244	,093	,165	2,622	,011	,636	1,572
	Peran Audit Internal	,350	,090	,335	3,882	,000	,338	2,963

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: data primer yang diolah 2021

1. Variabel Kompetensi SDM

Konklusi analisis uji t untuk variable penerapan Kompetensi SDM didapatkan nilai koefisien regresi terstandarisasi (beta) sebesar 0,277 positif dengan nilai probabilitas sebesar $0,004 < 0,05$ sehingga terkonklusikan hipotesis 1 mampu diterima.

2. Variabel penerapan SAP

Konklusi analisis uji t untuk variable penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan didapatkan nilai koefisien regresi terstandarisasi (beta) sebesar 0,157 positif dengan nilai probabilitas sebesar $0,044 < 0,05$ sehingga terkonklusi H2

mampu diterima.

3. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Konklusi analisis uji t untuk variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan(SPIP) didapatkan nilai koefisien regresi terstandarisasi (beta) sebesar 0,186 positif dengan nilai probabilitas sebesar $0,046 < 0,05$ sehingga terkonklusi H3 mampu diterima.

4. Variabel Pemanfaatan teknologi Informasi

Konklusi analisis uji t untuk variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) didapatkan nilai koefisien regresi terstandarisasi (beta) sebesar 0,165 positif dengan nilai probabilitas sebesar $0,011 < 0,05$ sehingga terkonklus H4 diterima.

5. Variabel Pera Audit Internal

Konklusi analisis uji t untuk variable Peran Audit Internal didapatkan nilai koefisien regresi terstandarisasi (beta) sebesar 0,335 positif dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga terkonklusi H5 diterima.

4.7.2 Uji F

Uji F diajukan untuk mengetahui baik tidaknya model regresi riset yang diajukan dimana nilai indeks F tersebut memiliki batas maksimal 5 % untuk memperoleh asumsi bahwa model regresi riset tergolong baik dan terpengaruh simultan antara aspek eksogen pada endogen. Konklusi berlaku sebaliknya ketika nilai batas kesalahan maksimal kalkulasi lebih dari 5 %.

Tabel 4. 20
Konklusi Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	395,245	5	79,049	68,080	,000 ^b
Residual	66,184	57	1,161		
Total	461,429	62			

Sumber: data primer yang diolah 2021

Pada tabel di atas memperlihatkan signifikasinya adalah 0,000 atau $\leq 0,005$. Nilai Fhitung \geq Ftabel (pada df 4;55) yaitu $68,080 > 2,54$ maka model regresi yang digunakan sudah tepat / fit, yaitu penerapan Kompetensi SDM (X1), Penerapan PSAP (X2), Pengendalian Intern (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), dan Peran Audit Internal (X5), secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.7.3 Uji Determinasi R^2

Konklusi analisa determinan value diajukan untuk mengidentifikasi seberapa kuat kapabilitas aspek eksogen untuk tiap model regresi riset dalam menjabarkan nilai aspek endogennya. Nilai determinan yang tinggi menandakan kapabilitas penjabaran aspek eksogen tinggi. Konklusi berlaku sebaliknya ketika nilai determinan semakin rendah sehingga tingkat keakurasian penjabaran menjadi rendah yang berpotensi menimbulkan kelemahan konklusi riset. Berikut adalah konklusi uji R^2

Tabel 4. 21
Konklusi Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,926 ^a	,857	,844	1,078

Sumber: data primer yang diolah 2021

Berpedoman tabel diatas memperlihatkan nilai *Adjusted R square* adalah 0,844 atau 84,4%. Maka Kompetensi SDM (X1), Penerapan PSAP (X2), Pengendalian Intern (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), dan Peran Audit Internal (X5), dapat menjelaskan 27% variasi variable kualitas laporan keuangan & sisanya 15,6% dijelaskan oleh variable lain di luar model.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Konklusi riset memperlihatkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti banyak pegawai yang kurang puas terhadap gaji maupun tempat bekerja ataupun lingkungan yang kurang baik sehingga hal ini menghambat dalam menyelesaikan laporan keuangan, yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan menjadi tidak maksimal. Pemerintah daerah sebagai pelayanan publik menerima amanah menyajikan informasi bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, suatu organisasi dikatakan berkonklusi apabila tujuan organisasinya tercapai, dan tentunya harus didukung oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia didalamnya.

Riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan Ningrum (2018) dan Hakim (2017) yang menjelaskan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.8.2 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap kualitas laporan keuangan

Hubungan antara skor yang paling penting pada setiap variabel dan jumlah hal alamat pada setiap variabel dapat digunakan untuk menentukan kekambuhan kepribadian masing-masing variabel, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori: sangat tinggi dan cukup tinggi. Dengan menggunakan persamaan perhitungan sementara (I), hitunglah harga sementara untuk membedakan kategori responden terhadap variabel pertanyaan: Untuk meningkatkan kualitas laporan anggaran pemerintah, pemerintah yang disebut sebagai open benefit organization, berhati-hati menyusun laporan keuangan dalam rangka menyusun laporan keuangan

yang berkualitas, mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan landasan pembukuan, dan akuntansi. -pemahaman berbasis. Arah kerangka kerja pembukuan adalah salah satu faktor penentu yang tinggi. Berpedoman konklusi riset oleh Wahyuni (2018) yang menyatakan bahwa kelayakan penerapan SAP termasuk berdampak positif terhadap kualitas laporan anggaran. Dalam pertanyaan Hakim tentang (2017) juga ditemukan kesimpulan bahwa perluasan OPD mengeksekusi SAP, kualitas laporan moneter yang disimpulkan akan jauh lebih baik.

4.8.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap kualitas laporan keuangan

Konklusi riset memperlihatkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,003 < 0,05$ yang Artinya bahwa hipotesis kedua (H3) dapat diterima, memperlihatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) memengaruhi nilai kualitas laporan keuangan. Apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dilaksanakan dengan benar, dan akan tersedia laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Konklusi ini sejalan dengan riset Hakim (2017) didapati bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan riset Merlyn, et.al, (2015) didapati hal yang sama dimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan(SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.8.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Konklusi riset memperlihatkan bahwa pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,011 < 0,05$ yang Artinya bahwa hipotesis keempat (H4) di tolak hal ini dapat di buktikan dengan rendahnya tingkat rata-rata pada analisis descriptive pada indikator kemudahan penggunaan TI dalam berinteraksi sebesar 3,25% hal ini di perkuat juga dengan rata-rata umur responden paling tinggi pada usia 30-40 tahun yang berarti dalam usia tersebut pegawai bisa memahami dalam berinteraksi menggunakan system TI berdampak pada ketepatan jadwal dan waktu pelaporan & ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitas laporan keuangan itu sendiri.

Laporan keuangan disusun oleh pemerintah melalui tahapan penyusunan melalui seperangkat komputer membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kerangka data terkait uang wilayah dapat menjadi perangkat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan data terkait uang. Oleh karena itu, pemerintah yang memanfaatkan inovasi data (komputer dan sistem) akan dihadapkan pada berbagai preferensi, baik dari segi akurasi/presisi kesimpulan kerja maupun predikatnya sebagai mesin serba guna, multiprosesor (Nurillah, 2014). Pemanfaatan inovasi data juga akan mengurangi blunder yang terjadi saat mengumpulkan informasi moneter dan menyimpulkan data anggaran dengan tepat. Hal ini berarti jika pemanfaatan tidak digunakan secara maksimal akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian berarti bahwa pemanfaatan TI memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan, hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Ningrum (2018) dan Merlyn, et.al, (2015) didapati pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.8.5 Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap kualitas laporan keuangan

Konklusi riset memperlihatkan bahwa Sistem Peran Audit Internal berpengaruh positif yang Artinya bahwa hipotesis kelima (H5) dapat diterima, memperlihatkan Peran Audit Internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi Peran Audit Internal pada OPD Kabupaten Pati maka kualitas laporan keuangan yang dikonklusikan akan semakin baik dan akurat. Internal audit berperan penting dalam pencegahan kecurangan pelaporan keuangan. Jika fungsi pengendalian tidak terkontrol maka penyusunan laporan keuangan tidak luput dari kesalahan, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi buruk. Jadi semakin baik peran audit internal dalam fungsi pengendaliannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dikonklusikan.

Hal ini sejalan dengan riset Nugroho & Setyowati (2019) didapati peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Didukung konklusi riset Arief (2016) audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berpedoman konklusi beserta hasil analisa data riset maka didapatkan kajian konklusi ilmiah sebagai berikut:

1. Konklusi analisa riset memperlihatkan Kompetensi SDM mempengaruhi nilai kualitas laporan keuangan dengan signifikan sehingga nilai kompetensi SDM yang tinggi akan menaikkan nilai kualitas laporan keuangan yang mampu dihasilkan.
2. Konklusi analisa riset memperlihatkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menaikkan nilai hasil kualitas laporan keuangan Pemda. Sehingga implementasi SAP yang tinggi menaikkan pada nilai kualitas laporan keuangan yang baik.
3. Konklusi analisa riset memperlihatkan Sistem Pengendalian Intern menaikkan nilai hasil Kualitas laporan keuangan Pemda. Sistem Pengendalian intern Akuntansi dengan lebih baik oleh Pemda akan menaikkan nilai kualitas laporan keuangan Pemda.
4. Konklusi analisa riset memperlihatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi menaikkan nilai Kualitas laporan keuangan Pemda. Penggunaan teknologi informasi secara massif menaikkan pada nilai kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

5. Konklusi analisa riset memperlihatkan Peran Audit Internal memiliki pengaruh positif pada Kualitas laporan keuangan Pemda. Sistem Peran Audit Internal yang lebih baik akan menaikkan Kualitas penyajian laporan keuangan Pemda.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Kepala dan staf sub bagian akuntansi / penatausahaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

1. Penerapan penentuan batas dan penentuan toleransi risiko salah uji perlu dikelola dengan lebih baik lagi.
2. Perlu adanya pendampingan dan arahan kepada staf sub bagian akuntansi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak terjadi penyalahgunaan data informasi dalam proses penyusunannya.
3. Materi Pelatihan mengenai fungsi pengelolaan keuangan perlu dikaji ulang agar sesuai dengan kebutuhan saat ini.
4. Rasa Kepercayaan diri staf sub bagian akuntansi perlu lebih ditingkatkan karena masih banyak staf yang takut untuk meninggalkan lembaga tempat mereka bekerja sekarang karena khawatir tidak bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik.
5. Pencatatan transaksi yang ada di OPD yang dilakukan oleh staf perlu mendapat pendampingan dari kepala bagian, agar transaksi yang dicatat dapat sesuai dengan realitas ekonomi yang ada (meminimalisir manipulasi data transaksi).

6. Perlunya meminimalisir kesalahan-kesalahan informasi Laporan Keuangan yang berkaitan dengan material.

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

1. Riset selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar riset yang telah dilakukan seperti menambahkan variabel Tekanan Waktu, Integritas Staf Akuntansi.
2. Riset selanjutnya disarankan untuk memperluas pengambilan sampel, karena pada riset ini peneliti hanya menggunakan 63 sampel.
3. Riset lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survei tanpa terbatas wilayah, waktu, dan biaya sehingga hasil riset dapat disimpulkan secara umum.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Konklusi dikemukakan dalam riset ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain:

1. Model riset yang dipergunakan pada riset ini masih belum mempergunakan variasi variabel intervensi maupun moderasi guna menghasilkan nilai kesimpulan yang jauh lebih akurat.
2. Jumlah responden yang dianalisa dari 111 kuesioner hanya terisi dengan baik sebanyak 63 responden serta masih sebatas pada satu instansi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustus, N., & Razak, J. (2017). The Effect Of Human Resources Competence On The Government Implementation Of Internal Control System, Accrual Based Accounting Standards And The Quality Of Local Government's Financial Report (An Empirical Study On Local Government Of Konawe Regency). *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep)*, 2(2), 15–40.
- Arief, R. (2016). Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eksternal Pada Sebuah Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 7(01), 78768.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–54.
- Baturante, N., Kamase, J., & Nasaruddin, F. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 117–127.
- Dasmaran, V., Yulaeli, T., & Selfiani. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada BadanPengelolaan Keuangan Aset Daerah (Bpkad) Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 170–178.
- Erawati, T., & Tarigan, M. S. B. (2019). Pengaruh Peran Internal Audit , Pemahaman Tentang Pp No 71 Tahun 2010 , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 3(1),
- Hakim, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jom Fekon*, 53(9), 1756–1770.
- Hasnani, L. (2016). Prog. Study Accounting, Faculty Of Economics Univ. Riau ,. *Jom Fekon*, 3(1), 16–30.
- Haza, I. I. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kota Padang). *Fakultas Ekonomi UniversitasNegeri Padang*, 2–17.

- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada OPD Di Pemprov Ntb). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di KabupatenKepulauan Talaud. *Accountability*, 5, 98.
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 133–143.
- Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, J. D. L. W. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap KualitasLaporanKeuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris Di Pemda KabupatenBarru). *Akuntabel*, 14(1), 57.
- Nazaruddin, & Syahrial. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (Jaktabangun) Stie Lhokseumawe*, 3(Vol 3 No 1 (2017): 2017), 105–120.
- Ningrum, T. I. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan AgamaBatam. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 15(2), 78–97.
- Nugroho, F. A., & Setyowati, W. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Econbank: Journal Of Economics And Banking*, 1(2), 125–134. <https://doi.org/10.35829/Econbank.V1i2.45>
- Pangestu, M. E., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 108–119.

Pebriani, R. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyuwangi Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global*, 10(1), 55–62.

Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) (Spip) Dalam Perspektif Coso'' Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(08), 1–11.

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Jurnal Nominal*, Vi(2), 14–28.

Rahayu, A., & Mardiana, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Sebagai Variabel Moderating Pada Lkpd Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 169–192.

Rahman, D., Hardi, & Diyanto, V. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Riau). *Jom Fekon Vol.*, 2(2), 1–15.

Riyadi, W. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemahaman Akuntansi Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Di Kabupaten Majalengka. *Jaksi (Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 55–74.

Sari, G. I., & Fadli. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17–34.

Septarini, D. F., & Papilaya, F. (2016). Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vii(2), 100–116.

Septiana, L. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit

- Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(3), 1576–1580.
- Sholohah, S. A., & Sulistyawati, A. I. (2018). Kualitas Laporan Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Semarang). *Fokus Ekonomi*, 13(2), 280–300.
- Sukiati, W., Fitriana, & Rustandi, B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Bumdi. *Forum Keuangan Dan Bisnis*, 1(V), 234–240.
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : Sukmayantidian@Gmail.Com / Telp : + 6285205142199 Faku. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 768–792.
- Triwardana, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD. *Jom Fekon*, 4(1), 641–655.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i2.270>
- Wardani, D. K., Ayem, S., & Ningrum, T. I. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam The Influence Of Quality Of Human Resources , Utilization Of. *Prosiding Seminar Nasional Multimedia & Artificial Intelligence*, 84.
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2019). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah , Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1–10.

LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian kuesioner

Kuesioner penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengenai identitas responden, sedangkan bagian kedua mengenai daftar pernyataan-pernyataan yang terdiri dari kuesioner kualitas laporan keuangan, kuesioner Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kuesioner kompetensi sumber daya manusia, kuesioner Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), kuesioner pemanfaatan teknologi informasi, serta kuesioner peran audit internal

BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN

- a. **Nama Responden :**
- b. **Jenis Kelamin :** Pria Wanita
- c. **Umur :** Tahun
- d. **Pendidikan Terakhir :** SMA D3 S1 S2 S3
- e. **Nama Instansi :**
- f. **Jabatan :**
- g. **Lama Bekerja :** 1-5 tahun 6-10 tahun 10 tahun

CARA PENGISIAN KUESIONER

Mohon Bapak / Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi Bapak / Ibu bekerja, dengan memberikan tanda centang () pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih :

TS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju
 TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju
 : Netral

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)

	Pernyataan	S	S		
	evan				
	ormasi dalam Laporan keuangan dapatdigunakan sebagai alat untuk memprediksi adian masa yang akan datang (<i>predictivevalue</i>).				
	dal				
	ormasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang nyesatkan dan kesalahan yang bersifatmaterial				
	pat Dibandingkan				
	ansi/lembaga tempat saya bekerja selalu nggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.				
	pat Dipahami				
	ormasi yang dihasilkan dari laporan angan telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.				

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Pernyataan	S	S	N	S	S
endidikan					
1. Staf OPD mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini.					
atihan					
Pelatihan-pelatihan untuk membantu pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan					
ngalaman					
Staf OPD memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi.					
nggung Jawab					
4. Peran dan tanggung jawab seluruh staf OPD ditetapkan secara jelas dalam peraturan					

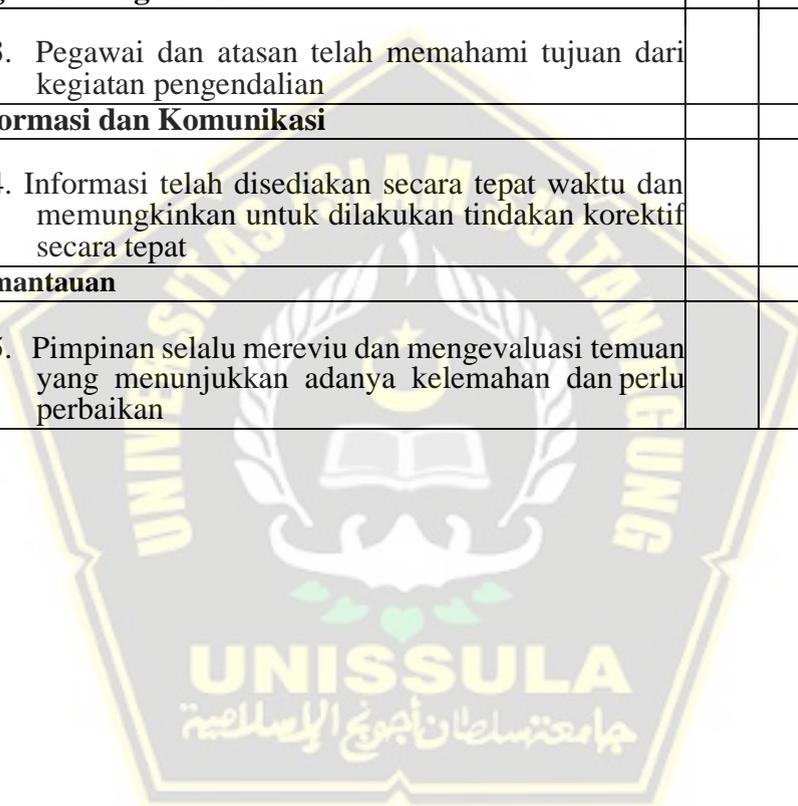


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X2

	Pernyataan	S	§				
AP No. 01 tentang Penyajian laporan Keuangan							
	ya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas						
AP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran							
	ya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas						
	ya selalu mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto						
AP No. 03 tentang Laporan Arus Kas							
	ya selalu menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi						
AP No. 04 tentang CALK							
	ya selalu mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.						
AP No. 06 tentang Akuntansi Investasi							
	ya selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.						
	ya selalu menggunakan metode biaya untuk penilaian investasi atas kepemilikan kurang dari 20%.						
AP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap							
	ya selalu mengklasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas						
AP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan							
	ya selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi						
AP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban							
	ya selalu mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul						
AP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan							
	ya selalu mengoreksi kesalahan yang tidak terungkap melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan						
AP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi							
	laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi						

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) X3

Pernyataan	S	S	N	S	S
ingkungan Pengendalian					
1. Pimpinan telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai					
ilaian Resiko					
2. Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi					
giatan Pengendalian					
3. Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian					
ormasi dan Komunikasi					
4. Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					
mantauan					
5. Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					



Pemanfaatan Teknologi Informasi X4

Pernyataan	S			S	
Proses kerja secara elektronik					
OPD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.					
Pengolahan dan penyimpanan data keuangan					
Pengolahan dan penyimpanan data keuangan pengadilan agama Batam menggunakan software yang sesuai dengan peraturan atau terkomputerisasi.					
Pengolahan informasi dengan jaringan internet					
Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
Sistem manajemen					
Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi					
Pelatihan dan pemeliharaan pada perangkat komputer					
Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur					

Peran Auditor Internal X5

Pernyataan	S		N	S	
Integritas					
1. Auditor internal melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh					
Objektivitas					
2. Auditor internal mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mengubah pelaporan kegiatankegiatan yang diaudit					
Kerahasiaan					
3. Auditor internal tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.					
Kompetensi					
Auditor internal terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.					

Frequencies

Statistics

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4
N	Valid	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,34	3,11	3,37	3,38

Frequency Table

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	15	23,8	23,8	23,8
	N	17	17,5	17,5	41,3
	S	31	58,7	58,7	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	15,9	15,9	15,9
	N	34	55,6	55,6	71,4
	S	18	28,6	28,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	12	19,0	19,0	19,0
	N	16	25,4	25,4	44,4
	S	34	55,6	55,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	22,2	22,2	22,2
	N	17	17,5	17,5	39,7
	S	38	63,3	63,3	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12
N	Valid	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	3,62	3,67	3,52	3,63	3,68	3,59	3,56	3,63	3,57	3,68	3,54	3,56

Frequency Table

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	6,3	6,3	6,3
	N	16	25,4	25,4	31,7
	S	43	68,3	68,3	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	15	23,8	23,8	28,6
	S	45	71,4	71,4	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	24	38,7	38,7	42,9
	S	36	57,1	57,1	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	6,3	6,3	6,3
	N	17	27,0	27,0	33,3
	S	42	66,7	66,7	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	14	22,2	22,2	27,0
	S	46	73,0	73,0	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	20	31,7	31,7	36,5
	S	40	63,5	63,5	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	22	34,4	34,4	39,7
	S	38	63,3	63,3	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	6,3	6,3	6,3
	N	15	23,8	23,8	30,4
	S	44	69,8	69,8	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	6,3	6,3	6,3
	N	19	30,2	30,2	36,5
	S	40	63,5	63,5	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.10

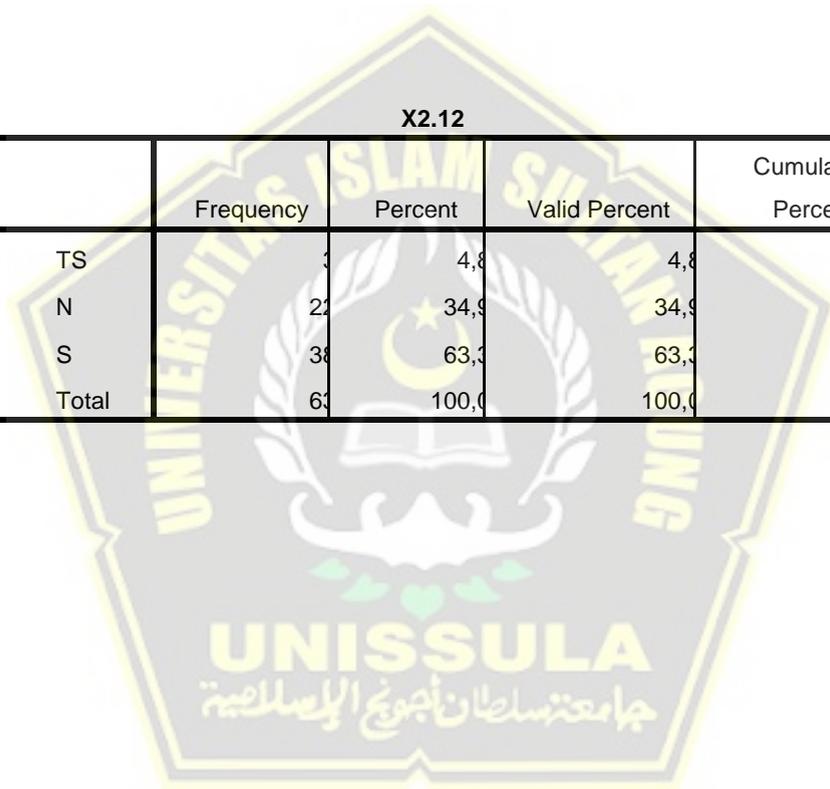
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	14	22,2	22,2	27,0
	S	46	73,0	73,0	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X2.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	3,2	3,2	3,2
	N	24	39,7	39,7	42,9
	S	36	57,1	57,1	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X2.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4,8	4,8	4,8
	N	22	34,9	34,9	39,7
	S	35	63,3	63,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	



Frequencies

Statistics

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
N	Valid	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		2,75	3,02	2,78	2,98	2,73

Frequency Table

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	17	27,0	27,0	27,0
	N	45	71,4	71,4	98,4
	S	1	1,6	1,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	16	25,4	25,4	25,4
	N	30	47,6	47,6	73,0
	S	17	27,0	27,0	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	18	28,6	28,6	28,6
	N	41	65,7	65,7	93,7
	S	1	6,3	6,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	17	27,0	27,0	27,0
	N	30	47,6	47,6	74,6
	S	13	25,4	25,4	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	18	28,6	28,6	28,6
	N	44	69,8	69,8	98,4
	S	1	1,6	1,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		X4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5
N	Valid	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3,92	3,63	3,74	3,59	3,71

Frequency Table

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	58	7,9	7,9	7,9
	S	58	92,1	92,1	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	25	39,7	39,7	39,7
	S	38	63,3	63,3	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	16	25,4	25,4	25,4
	S	47	74,6	74,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	26	41,3	41,3	41,3
	S	37	58,7	58,7	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x4.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	18	28,6	28,6	28,6
	S	44	71,4	71,4	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		x5.1	x5.2	x5.3	x5.4
N	Valid	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,13	3,05	3,03	2,86

Frequency Table

x5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	13	20,6	20,6	20,6
	N	29	46,0	46,0	66,7
	S	21	33,3	33,3	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	15	23,8	23,8	23,8
	N	30	47,6	47,6	71,4
	S	18	28,6	28,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x5.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	23,8	23,8	23,8
	N	30	47,6	47,6	71,4
	S	18	28,6	28,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

x5.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	23	36,3	36,3	36,3
	N	26	41,3	41,3	77,8
	S	14	22,2	22,2	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		y1	y2	y3	y4
N	Valid	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,30	3,17	3,21	3,22

Frequency Table

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	12,7	12,7	12,7
	N	28	44,4	44,4	57,1
	S	27	42,9	42,9	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

y2

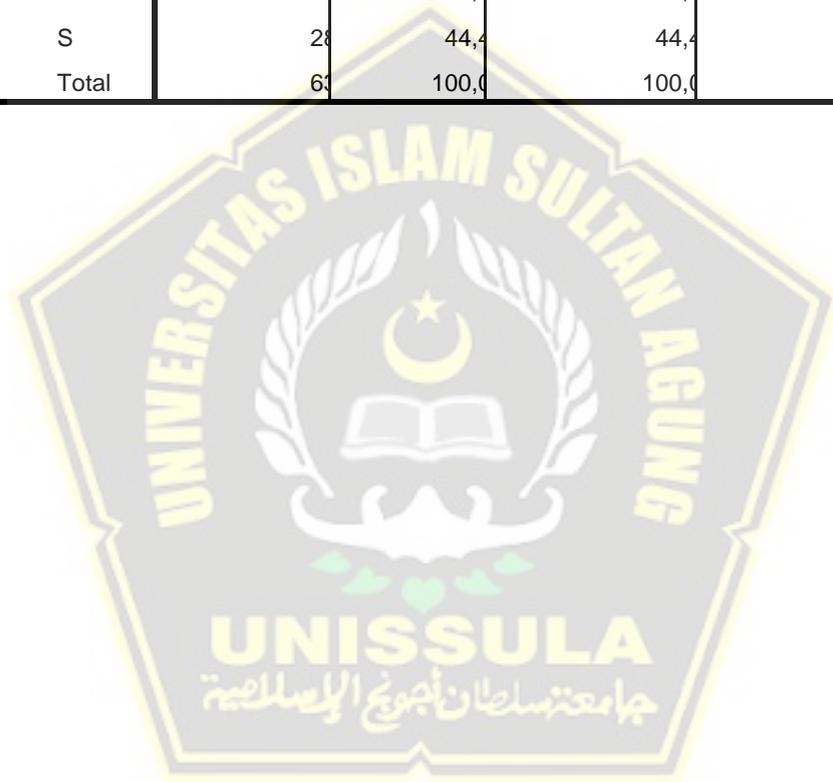
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	23,8	23,8	23,8
	N	22	34,9	34,9	58,7
	S	26	41,3	41,3	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	22,2	22,2	22,2
	N	22	34,9	34,9	57,1
	S	27	42,9	42,9	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	22,2	22,2	22,2
	N	21	33,3	33,3	55,6
	S	28	44,4	44,4	100,0
	Total	63	100,0	100,0	



Correlations

		Correlations				Kompetensi SDM
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	
x1.1	Pearson Correlation	1	,671 ^{**}	,870 ^{**}	,886 ^{**}	,944 ^{**}
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63
x1.2	Pearson Correlation	,671 ^{**}	1	,653 ^{**}	,675 ^{**}	,802 ^{**}
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63
x1.3	Pearson Correlation	,870 ^{**}	,653 ^{**}	1	,916 ^{**}	,946 ^{**}
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	63	63	63	63	63
x1.4	Pearson Correlation	,886 ^{**}	,675 ^{**}	,916 ^{**}	1	,957 ^{**}
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	63	63	63	63	63
Kompetensi SDM	Pearson Correlation	,944 ^{**}	,802 ^{**}	,946 ^{**}	,957 ^{**}	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Correlations

		Correlations												Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaha
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	
X2.1	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N		,638 ,00 6	,699 ,00 6	,935 ,00 6	,679 ,00 6	,775 ,00 6	,871 ,00 6	,538 ,00 6	,679 ,00 6	,631 ,00 6	,658 ,00 6	,871 ,00 6	,898 ,00 6
X2.2	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,638 ,00 6		,576 ,00 6	,636 ,00 6	,874 ,00 6	,549 ,00 6	,466 ,00 6	,815 ,00 6	,554 ,00 6	,925 ,00 6	,521 ,00 6	,466 ,00 6	,797 ,00 6
X2.3	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,699 ,00 6	,576 ,00 6		,674 ,00 6	,634 ,00 6	,866 ,00 6	,632 ,00 6	,589 ,00 6	,763 ,00 6	,507 ,00 6	,784 ,00 6	,632 ,00 6	,835 ,00 6
X2.4	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,935 ,00 6	,636 ,00 6	,674 ,00 6		,663 ,00 6	,753 ,00 6	,847 ,00 6	,564 ,00 6	,614 ,00 6	,613 ,00 6	,587 ,00 6	,847 ,00 6	,877 ,00 6
X2.5	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,679 ,00 6	,874 ,00 6	,634 ,00 6	,663 ,00 6		,672 ,00 6	,540 ,00 6	,792 ,00 6	,533 ,00 6	,898 ,00 6	,498 ,00 6	,540 ,00 6	,828 ,00 6
X2.6	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,775 ,00 6	,549 ,00 6	,866 ,00 6	,753 ,00 6	,672 ,00 6		,721 ,00 6	,616 ,00 6	,800 ,00 6	,575 ,00 6	,784 ,00 6	,721 ,00 6	,886 ,00 6
X2.7	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,871 ,00 6	,466 ,00 6	,632 ,00 6	,847 ,00 6	,540 ,00 6	,721 ,00 6		,488 ,00 6	,578 ,00 6	,540 ,00 6	,540 ,00 6	1,000 ,00 6	,827 ,00 6
X2.8	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,538 ,00 6	,815 ,00 6	,589 ,00 6	,564 ,00 6	,792 ,00 6	,616 ,00 6	,488 ,00 6		,658 ,00 6	,840 ,00 6	,542 ,00 6	,488 ,00 6	,793 ,00 6
X2.9	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,679 ,00 6	,554 ,00 6	,763 ,00 6	,614 ,00 6	,533 ,00 6	,800 ,00 6	,578 ,00 6	,658 ,00 6		,533 ,00 6	,866 ,00 6	,578 ,00 6	,819 ,00 6
X2.10	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,631 ,00 6	,925 ,00 6	,507 ,00 6	,613 ,00 6	,898 ,00 6	,575 ,00 6	,540 ,00 6	,840 ,00 6	,533 ,00 6		,498 ,00 6	,540 ,00 6	,808 ,00 6
X2.11	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,658 ,00 6	,521 ,00 6	,784 ,00 6	,587 ,00 6	,498 ,00 6	,784 ,00 6	,540 ,00 6	,542 ,00 6	,866 ,00 6	,498 ,00 6		,540 ,00 6	,784 ,00 6
X2.12	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,871 ,00 6	,466 ,00 6	,632 ,00 6	,847 ,00 6	,540 ,00 6	,721 ,00 6	1,000 ,00 6	,488 ,00 6	,578 ,00 6	,540 ,00 6	,540 ,00 6		,827 ,00 6
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,898 ,00 6	,797 ,00 6	,835 ,00 6	,877 ,00 6	,828 ,00 6	,886 ,00 6	,827 ,00 6	,793 ,00 6	,819 ,00 6	,808 ,00 6	,784 ,00 6	,827 ,00 6	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Correlations

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
X3.1	Pearson Correlation		,478**	,397**	,455**	,472**	,620**
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
X3.2	Pearson Correlation	,478**		,690**	,971**	,792**	,939**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
X3.3	Pearson Correlation	,397**	,690**		,712**	,923**	,854**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
X3.4	Pearson Correlation	,455**	,971**	,712**		,813**	,944**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
X3.5	Pearson Correlation	,472**	,792**	,923**	,813**		,923**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	63	63	63	63	63	63
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Pearson Correlation	,620**	,939**	,854**	,944**	,923**	
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Correlations

		Correlations					Pemanfaatan Teknologi Informasi
		X4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	
X4.1	Pearson Correlation		,362	,503	,350	,464	,572
	Sig. (1-tailed)		,002	,000	,002	,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
x4.2	Pearson Correlation	,362		,719	,902	,636	,891
	Sig. (1-tailed)	,002		,000	,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
x4.3	Pearson Correlation	,503	,719		,696	,923	,919
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
x4.4	Pearson Correlation	,350	,902	,696		,683	,895
	Sig. (1-tailed)	,002	,000	,000		,000	,000
	N	63	63	63	63	63	63
x4.5	Pearson Correlation	,464	,636	,923	,683		,888
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	63	63	63	63	63	63
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pearson Correlation	,572	,891	,919	,895	,888	
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Correlations

Correlations

		x5.1	x5.2	x5.3	x5.4	Peran Audit Internal
x5.1	Pearson Correlation	1	,657	,687	,733	,867
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63
x5.2	Pearson Correlation	,657	1	,970	,626	,915
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63
x5.3	Pearson Correlation	,687	,970	1	,626	,923
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	63	63	63	63	63
x5.4	Pearson Correlation	,733	,626	,626	1	,844
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	63	63	63	63	63
Peran Audit Internal	Pearson Correlation	,867	,915	,923	,844	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Correlations

Correlations

		y1	y2	y3	y4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
y1	Pearson Correlation	1	,464	,868	,853	,885
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63
y2	Pearson Correlation	,464	1	,587	,634	,752
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	63	63	63	63	63
y3	Pearson Correlation	,868	,587	1	,987	,964
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	63	63	63	63	63
y4	Pearson Correlation	,853	,634	,987	1	,965
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	63	63	63	63	63
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	,885	,752	,964	,965	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	63	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,934	4

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	63	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,959	12

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	63	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	4

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

		N	%
Cases	Valid	63	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	63	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
,897	4

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	63	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,909	4

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	63	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	4

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SDM ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,926	,857	,844	1,076

a. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	395,245	5	79,049	68,080	,000 ^b
	Residual	66,184	57	1,161		
	Total	461,429	62			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SDM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5,268	1,573		-3,350	,001		
	Kompetensi SDM	,263	,087	,271	3,027	,004	,301	3,321
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,073	,035	,151	2,056	,044	,434	2,304
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	,196	,063	,181	3,112	,003	,706	1,416
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,244	,093	,165	2,622	,011	,636	1,572
	Peran Audit Internal	,350	,090	,331	3,882	,000	,338	2,963

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

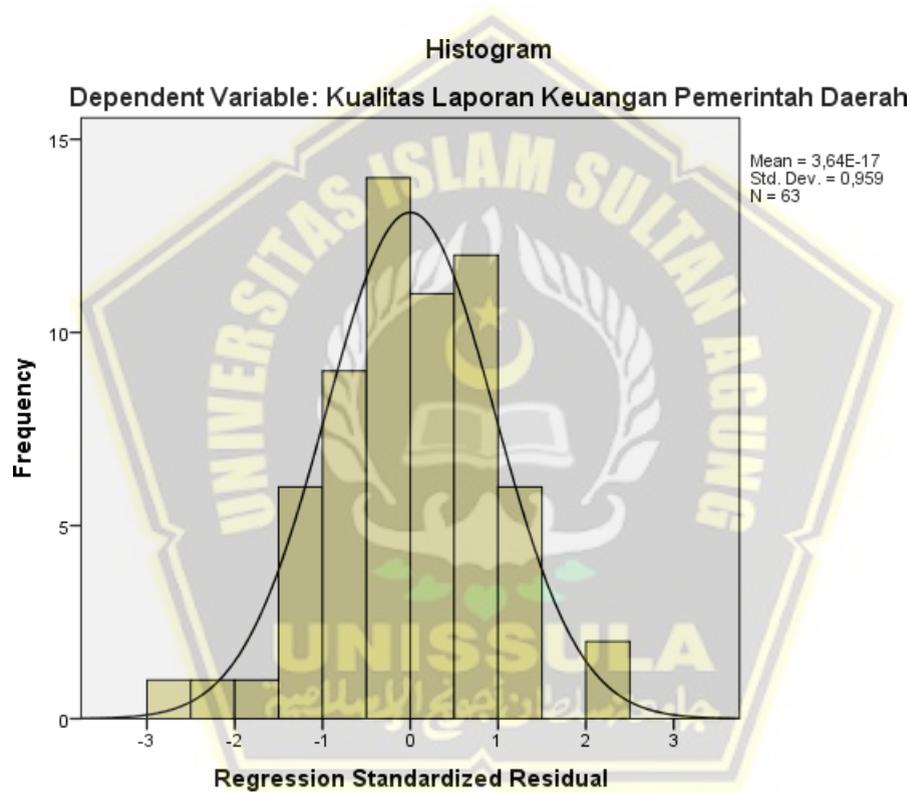
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7,58	16,48	12,90	2,52	63
Std. Predicted Value	-2,10	1,41	,00	1,00	63
Standard Error of Predicted Value	,18	,57	,31	,09	63
Adjusted Predicted Value	7,30	16,53	12,91	2,52	63
Residual	-2,76	2,41	,00	1,03	63
Std. Residual	-2,56	2,24	,00	,95	63
Stud. Residual	-2,63	2,37	,00	1,00	63
Deleted Residual	-2,92	2,70	,00	1,14	63
Stud. Deleted Residual	-2,79	2,47	-,00	1,02	63
Mahal. Distance	,91	16,52	4,92	3,84	63
Cook's Distance	,00	,11	,01	,02	63
Centered Leverage Value	,01	,26	,07	,06	63

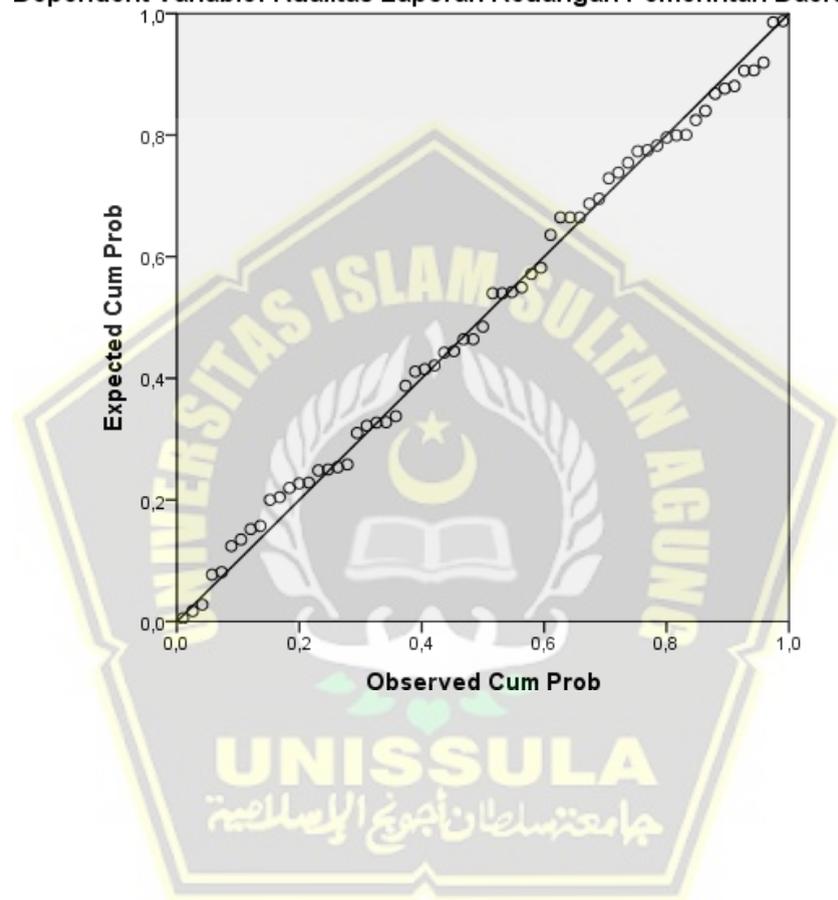
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

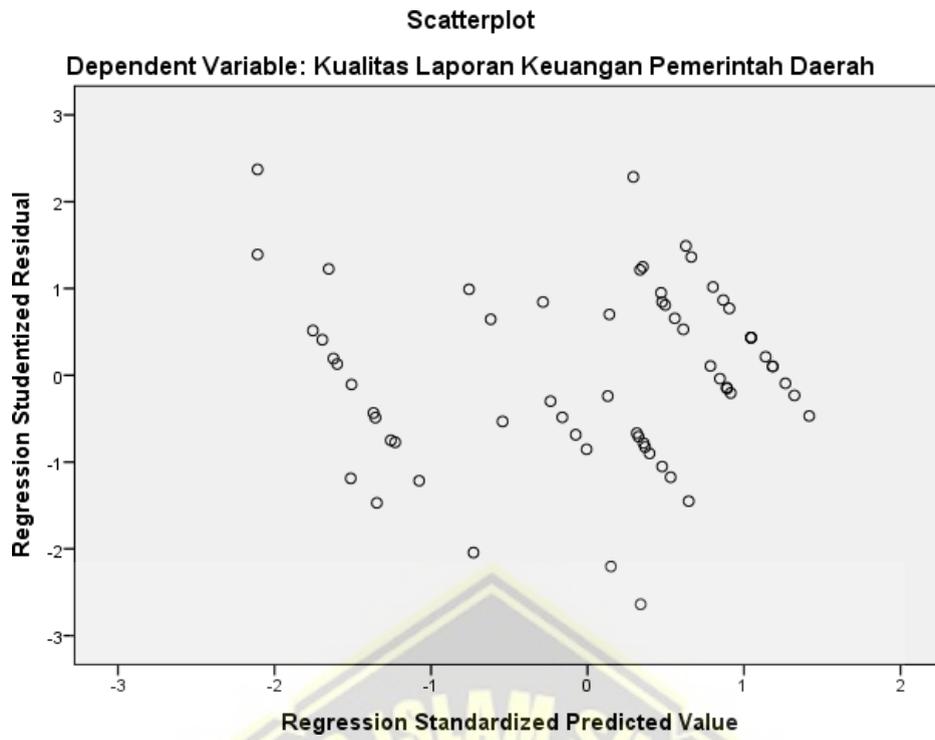


Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,03319052
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,040
	Negative	-,052
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) , Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Kompetensi SDM ^b		Enter

a. Dependent Variable: abs

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,227	,052	-,032	,62747

a. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) , Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: abs

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,221	4	,244	,620	,685
	Residual	22,441	57	,394		
	Total	23,663	62			

a. Dependent Variable: abs

b. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SDM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,550	,916		1,692	,096
	Kompetensi SDM	-,013	,051	-,062	-,264	,793
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	-,001	,021	-,006	-,029	,977
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	,021	,037	,086	,559	,578
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-,018	,054	-,054	-,332	,741
	Peran Audit Internal	-,040	,053	-,169	-,763	,449

a. Dependent Variable: abs

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,5497	1,1232	,8215	,1403	63
Std. Predicted Value	-1,937	2,149	,000	1,000	63
Standard Error of Predicted Value	,110	,333	,185	,057	63
Adjusted Predicted Value	,4533	1,3407	,8277	,17344	63
Residual	-,92897	1,90374	,00000	,63164	63
Std. Residual	-1,481	3,034	,000	,955	63
Stud. Residual	-1,678	3,124	-,004	1,009	63
Deleted Residual	-1,24319	2,01875	-,00557	,66773	63
Stud. Deleted Residual	-1,706	3,402	,006	1,041	63
Mahal. Distance	,912	16,529	4,927	3,846	63
Cook's Distance	,000	,185	,019	,034	63
Centered Leverage Value	,015	,267	,079	,061	63

a. Dependent Variable: abs



Frequencies

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Bekerja (tahun)	Lama Bekerja (tahun)
N	Valid	63	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	32	49,2	49,2	49,2
	Wanita	31	50,8	50,8	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30 tahun	15	23,8	23,8	23,8
	30-40 tahun	25	39,7	39,7	63,5
	> 40 tahun	23	36,5	36,5	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	10	15,9	15,9	15,9
	S1	34	54,0	54,0	69,8
	S2	14	22,2	22,2	92,1
	Sarjana	5	7,9	7,9	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bendahara	4	6,3	6,3	6,3
	Bendahara	17	27,0	27,0	33,3
	BENDAHARA PENGELUARAN	1	1,6	1,6	34,9
	KASUBAG	1	1,6	1,6	36,5
	kasubag keuangan	4	6,3	6,3	42,9
	Kasubag Keuangan	13	20,6	20,6	63,5
	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	1	1,6	1,6	65,1
	staf bagian keuangan	1	1,6	1,6	66,7
	Staf bagian keuangan	2	3,2	3,2	69,8
	Staf Bagian Keuangan	12	19,0	19,0	88,9
	Staf Bagian Keuangan	1	1,6	1,6	90,5
	staf bagian keungan	1	1,6	1,6	92,1
	Staf Bagian Kuangan	1	1,6	1,6	93,7
	Staf Keuangan	2	3,2	3,2	96,8
	STAF PENGELOLA KEUANGAN	1	1,6	1,6	98,4
	Staff Keuangan	1	1,6	1,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Lama Bekerja (tahun)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 tahun	17	27,0	27,0	27,0
5-10 tahun	31	49,2	49,2	76,2
> 10 tahun	14	23,8	23,8	100,0
Total	62	100,0	100,0	

